



MENANGKAL RADIKALISME DALAM PENDIDIKAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018

**MENANGKAL
RADIKALISME
DALAM PENDIDIKAN**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018**

Menangkal Radikalisme dalam Pendidikan

Tim Penyusun :

Drs. Philip Suprastowo, PU
Unggul Sudrajat, SS
Bakti Utama, MA
Mikka Wildha Nurrochsyam, M.Hum.
Untung Tri Rahmadi, S.Sos.

ISBN : 978-602-0792-06-4

Penyunting :

Dr. Subijanto, M.Ed.
Ir. Yendri Wirda, M.Si
Erni Hariyanti, S.Psi.

Penerbit :

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365
Faks. +6221-5741664
Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>
Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, Desember 2018

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2018

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakkidbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2018 menerbitkan Buku Laporan Hasil Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2017. Penerbitan buku laporan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarkan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan wujud akuntabilitas publik.

Hasil penelitian ini telah disajikan di berbagai kesempatan secara terbatas, sesuai dengan kebutuhannya. Buku ini sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku laporan hasil penelitian ini.



Jakarta, Juli 2018

Kepala Pusat,

Muktiono Waspo

NIP 196710291993031002

KATA PENGANTAR

Disadari bahwa kendati pemerintah, pemerintah daerah, sekolah, orangtua dan masyarakat telah berupaya untuk menumbuhkan dan membentuk budipekerti dan karakter nasionalis serta toleran kepada peserta didik, namun tampaknya hasilnya belum begitu maksimal. Akhir-akhir ini muncul gejala yang mengkhawatirkan, yakni dikalangan pelajar yang tidak ingin, atau menentang dan bahkan mengganti Dasar Negara RI Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika dengan paham dan ideologi lain yang berbeda dengan kesepakatan para pendiri Negara RI. Bahkan beberapa lembaga survei independenpun mencari kebenaran radikalisme yang merebak dikalangan pelajar di Indonesia. Sebut saja ada *Wahid Foundation*, Setara Institut, Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), *Pew Research Center*, *Saiful Mujani Research & Consulting*. Hampir seluruhnya menyatakan terdapat indikasi paham yang mengarah ke radikalisme dikalangan pelajar.

Oleh karena itu, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017 ditugaskan untuk melakukan kajian terhadap isu radikalisme dikalangan pelajar yang menjadi perbincangan dan meresahkan di sebagian kalangan masyarakat. Kajian ini dimaksudkan agar segera dapat dicarikan solusi bagaimana strategi untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme serta memperkuat nilai Karakter Religious dan nilai Nasionalis yang berdasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di kalangan pelajar.

Studi ini menggunakan metode survei secara *online* yang ditujukan kepada siswa sekolah menengah atas (SMA) di tiga kota, yakni Yogyakarta, Malang dan Bogor. Survei di tiga lokasi tersebut tidak lepas dari studi cepat yang dilakukan pada

awal studi di Cilacap. Studi cepat di Cilacap tersebut merupakan penugasan khusus dari pimpinan Kemendikbud.

Semoga hasil laporan ini dapat didayagunakan sebagai alternatif solusi dalam mencegah terjadinya paham dan tindakan radikalisme di lingkungan sekolah.

Jakarta, 2017

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	9
A. Radikalisme	9
B. Ciri-ciri dan Faktor Penyebab Radikalisme	11
C. Definisi Operesional dan Indikator Radikalisme	12
D. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	14
E. Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti	36
F. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)	54
G. Nasioanalisme	62
H. Karakteristik Nasionalisme Indonesia	65
I. Toleransi Kehidupan Beragama	68
J. Tindakan Intoleransi dalam Kehidupan Beragama	70
K. Hasil-Hasil Penelitian Radikalisme	71
L. Radikalisme dan Pelajar: Fenomena Di Beberapa Negara	79
M. Kerangka Analisis	83
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	85
A. Pendekatan	85
B. Lokasi Penelitian	85
C. Teknik Pengumpulan Data	86
D. Analisis	88
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	89
A. Profil Responden	89
B. Penyebab Paham dan Tindakan Radikalisme	124
C. Upaya Pencegahan	131
BAB IV KESIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN	137
A. Kesimpulan	137
B. Opsi Kebijakan	138
DAFTAR PUSTAKA	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para pendiri bangsa dari berbagai latar belakang sepakat untuk membangun Negara kebangsaan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai kebhinekaan dan naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Guna mewujudkan kesepakatan tersebut telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Depdiknas, 2009) ditetapkan sebagai simbol identitas wujud **eksistensi bangsa** dilaksanakan berdasarkan asas: persatuan, kedaulatan, kehormatan, kebangsaan, ketertiban, kebhinnekatunggalikaan, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan (ps. 2); serta bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 3).

Kemudian dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehdupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Depdiknas, 2003). Lalu dalam Misi Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (PJPJN) 2005-2025 ditetapkan delapan misi pembangunan nasional yakni mewujudkan: 1) masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika berbudaya, dan beradab berdasarkan Pancasila, 2) bangsa yang berdaya saing, 3) masyarakat demokratis yang berdasarkan hukum, 4) Indonesia yang aman, damai dan bersatu, 5) pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, 6) Indonesia asri lestari, 7) Indonesia yang menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, dan 8) Indonesia berperan penting dalam pergaulan internasional.

Kebijakan lain yang mendukung NKRI yaitu Pencanangan Trisakti, yakni Mewujudkan Generasi yang Berkepribadian dalam Kebudayaan dan RPJMN 2015-2019: “Penguatan pendidikan karakter pada anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam matapelajaran”. Sejalan dengan itu, Pencanangan Nawa Cita yang penting dan strategis ialah pembangunan mental bangsa, melalui pembangunan karakter yang ditindaklanjuti Kemendikbud antara lain mencanangkan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) secara melalui pengembangan nilai utama, yakni Nilai Karakter Nasionalis, Nilai Karakter Religius, Nilai Karakter Mandiri, Nilai Karakter Gotong Royong, dan Nilai Karakter Integritas.

Keseriusan Pemerintah untuk penguatan ideologi Pancasila, tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), yang berfungsi antara lain merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi

Pancasila dan menyusun garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan roadmap pembinaan ideologi Pancasila. Ini merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam hal penguatan Pancasila.

Ditingkat teknis, kebijakan yang berkaitan dengan membangun jiwa kebangsaan dilaksanakan melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 21042/MPK/PR/2017 tanggal 11 April 2017 perihal implementasi PPK, yang menyebutkan bahwa a) memasang naskah pancasila, foto presiden, dan wakil presiden di setiap ruang kelas serta memasang beberapa foto pahlawan nasional dalam bingkai/pigura yang rapi; b) menyiapkan setiap kelas agar menyanyikan lagu Indonesia Raya di pagi awal kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan/ nasional sebelum pulang.

Namun demikian, akhir-akhir ini muncul gejala yang mengkhawatirkan, yakni di sementara kalangan pelajar yang tidak ingin, atau menentang dan bahkan mengganti dasar Negara RI Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika dengan paham dan ideologi lain yang berbeda dengan kesepakatan para pendiri Negara RI tersebut. Terdapat kecenderungan beberapa pelajar telah terpengaruh dan memiliki paham serta ideologi lain yang tidak sejalan dan mengakui Pancasila dan NKRI sebagaimana tercermin dalam hasil eksplorasi dari hasil penelitian di berbagai lembaga survei.



Diagram 1.1 Hasil Studi SETARA *Intitute for Democracy and Peace* (2016) terhadap Siswa SMA di Jakarta dan Bandung Raya

Dari hasil survei yang dilakukan oleh *SETARA Institute for Democracy and Peace* (SIDP) pada tahun 2015, menemukan antara lain 8,5% siswa menyatakan setuju jika Pancasila sebagai dasar negara diganti dengan agama tertentu, 7,2% responden yang setuju dengan gerakan ISIS. Sementara pada sasaran survey yang sama tahun 2016, kondisinya agak menurun yakni 5,8% siswa mendukung mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan 0,7% siswa setuju dengan gerakan ISIS.



Diagram 1.2 Hasil studi SETARA *Institute for Democracy and Peace* (2015) terhadap Siswa SMA di Jakarta dan Bandung Raya

Demikian pula hasil survey Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP, 2011) menemukan fakta yang lebih memprihatinkan, yakni terdapat 12,1% siswa setuju organisasi radikal dan 23,6% guru PAI setuju organisasi radikal; mengenai eksistensi Pancasila diketahui 25% siswa menyatakan Pancasila tidak relevan dan 21% guru PAI menyatakan Pancasila tidak relevan. Beberapa lembaga yang lain menemukan kondisi yang serupa. Oleh sebab itu perlu ada kewaspadaan mengenai penyebaran paham yang anti Pancasila dan UUD 1945 dan dapat menjawab mengapa para pelajar memiliki paham dan sikap seperti itu?

Di sinilah letak peran pendidikan kebinekaan yang berupaya menumbuhkan sensitivitas warga sekolah terhadap budaya masyarakat yang bersifat plural, sehingga tercipta sikap dan perilaku yang menghormati dan menghargai keberagaman. Dalam hal ini, pendidikan memiliki peran strategis dalam memperkuat pemahaman

kebinekaan dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Kajian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dan indikasi adanya paham-paham tersebut ditingkat sekolah serta bagaimana sekolah menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut kedalam pelajaran di kelas dan sekolah.

B. Rumusan Masalah

Indikasi empiris tentang radikalisme di lingkungan sekolah diatas meng-indikasikan bahwa kendati pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan satuan pendidikan telah berupaya mewujudkan berbagai kebijakan penanaman Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di kalangan pelajar, namun belum menunjukkan hasil yang optimal, mengingat masih terdapat beberapa pelajar dan guru yang memiliki paham yang berbeda, bahkan ingin mengganti dasar Negara Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Terkait dengan itu dapat dirumuskan permasalahannya yakni: “Bagaimana rekomendasi kebijakan tentang strategi untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme serta memperkuat nilai Karakter religious dan nilai nasionalis yang berdasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di kalangan pelajar“?

Agar diperoleh bahan rekomendasi yang komprehensif, maka selain memanfaatkan data/informasi dari hasil penelitian yang sudah ada, perlu lebih didalami, diperkaya dan dilakukan validasi fakta hasil studi yang ada terkait dengan:

1. Bagaimanakah kondisi paham dan tindakan radikalisme di lingkungan sekolah? Khususnya bagaimana tanggapan terhadap dasar Pancasila, UUD

1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di kalangan pelajar saat ini“?

2. Mengapa paham dan tindakan radikalisme terjadi di lingkungan sekolah? Atau mengapa tanggapan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di kalangan pelajar saat ini seperti itu?
3. Upaya apa saja yang telah/sedang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme terjadi di lingkungan sekolah?
4. Kebijakan apa yang dapat dijalankan untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme serta memperkuat Karakter nilai nasionalis yang berdasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di kalangan pelajar?

C. Tujuan

Tujuan kajian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan dan menganalisis:

1. Kondisi paham dan tindakan radikalisme di lingkungan sekolah, khususnya bagaimana tanggapannya terhadap dasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di kalangan pelajar saat ini.
2. Penyebab paham dan tindakan radikalisme terjadi di lingkungan sekolah, khususnya tanggapan terhadap terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di kalangan pelajar saat ini.
3. Upaya yang telah/sedang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme terjadi di Kalangan Pelajar.
4. Rekomendasi kebijakan tentang strategi untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme serta

memperkuat Karakter nilai nasionalis yang berdasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di kalangan pelajar.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Radikalisme

Wahid Foundation (2016) mendefinisikan radikalisme sebagai sikap atau tindakan yang mengatasnamakan agama yang tidak sejalan dengan dasar atau prinsip dasar kehidupan berbangsa yang menjunjung tinggi toleransi dan terbuka terhadap sesama warga yang majemuk yang dijamin keberadaannya oleh konstitusi, atau yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Bertolak pada definisi tersebut, studi ini melihat radikalisme tidak hanya dipahami pada tataran sikap/tindakan melainkan juga gagasan. Sementara itu, dalam studi ini yang dimaksud dengan prinsip dasar kehidupan berbangsa ialah nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Radikalisme sering dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Dalam studi Ilmu Sosial, Radikalisme diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas social atau ideologi yang dianutnya. Dengan demikian, radikalisme merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya maupun agama, yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi.

Radikalisme sering menimbulkan kerusuhan dan konflik sosial dan sering dikaitkan dengan agama. Imron (2000: 86) menyebutkan minimal ada dua alasan mengapa dimensi agama perlu ditekankan dalam pembahasan mengenai kerusuhan ataupun konflik sosial. Pertama, adanya indikasi bahwa modernisasi sosial-ekonomi di berbagai tempat yang berpenduduk muslim, justru mendorong peningkatan religiusitas, bukan sekularisme. Walaupun peningkatan religiusitas juga terjadi di kalangan pemeluk agama lain, yang terjadi pada umat Islam sangat mencolok. Persoalannya adalah bahwa proses itu ternyata memuat potensi yang dapat mengganggu keselarasan dalam hubungan antar umat beragama. Dalam masyarakat seperti itu, militansi cenderung meningkat, fundamentalisme berkembang, toleransi antar pemeluk agama menurun. Kedua, adanya dugaan bahwa proses yang sama menghasilkan pengenduran hubungan antara sebagian pemeluk agama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang melayaninya.

Tindakan radikalisme sering juga terjadi pada umat Islam. Arif (2010: 113) menyatakan bahwa radikalisme Islam sering muncul di “Islam Kota” yang tidak berada pada rengkuhan budaya Islam. Lebih lanjut Arif menyatakan bahwa pesantren adalah wujud “Islam desa” yang tidak terjadi radikalisme karena Islam telah lama tumbuh dalam struktur budaya di pesantren. Berbeda dengan itu, “Islam kota” sering terseret pada globalisasi Islam karena budaya Islam kurang merengkuh dengan baik. Sebagian besar aktivis Islam tidak mengenyam pendidikan kultural Islam seperti pesantren. Hal ini menyebabkan pemahaman para aktivis terhadap agama sangat dangkal dan tidak substansial. Aktivis yang semacam inilah yang sering bertindak secara radikal karena mudah tersulut oleh provokasi dari lingkungannya.

B. Ciri-ciri dan Faktor Penyebab Radikalisme

Kelompok radikal memiliki ciri-ciri antara lain; pertama sering mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. Klaim kebenaran selalu muncul dari kalangan yang seakan-akan mereka adalah Nabi yang tak pernah melakukan kesalahan ma'sum padahal mereka hanya manusia biasa. Klaim kebenaran tidak dapat dibenarkan karena manusia hanya memiliki kebenaran yang relatif dan hanya Tuhan yang tahu kebenaran absolut.

Kedua, radikalisme mempersulit agama yang sejatinya samhah (ringan) dengan mengganggu ibadah sunnah seakan-akan wajib dan makruh seakan-akan haram. Radikalisme dicirikan dengan perilaku beragama yang lebih memprioritaskan persoalan-persoalan sekunder dan mengesampingkan yang primer.

Ketiga, kelompok radikal kebanyakan berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. Dalam berdakwah mereka mengesampingkan metode gradual yang digunakan oleh Nabi, sehingga dakwah mereka justru membuat umat agama yang masih awam merasa ketakutan dan keberatan.

Ada berbagai penyebab terjadinya paham dan tindakan radikalisme. Hasil kajian *Unesco* (2016) mencatat ada beberapa factor yang mendorong dan penarik terjadinya radikalisme. "Faktor Dorong" mendorong individu ke ekstremisme kekerasan, seperti: marginalisasi, ketidaksetaraan, diskriminasi, penganiayaan atau pemahaman sejenisnya; keterbatasan terhadap akses dan mutu pendidikan yang relevan; Penolakan hak dan kebebasan sipil; dan keluhan lingkungan, sejarah dan sosio-ekonomi lainnya.

Adapun "Faktor Tarik" terjadinya ekstremisme kekerasan, antara lain: adanya kelompok ekstrimis yang terorganisir dengan baik dengan wacana dan program efektif yang memberikan layanan, pendapatan dan/atau pekerjaan dengan imbalan keanggotaan. Kelompok ini juga bisa memikat anggota baru dengan menyediakan gerai untuk keluhan dan janji petualangan dan kebebasan. Selanjutnya, kelompok-kelompok ini tampaknya menawarkan kenyamanan rohani, "tempat untuk dimiliki" dan jaringan sosial yang mendukung. Ditambahkan bahwa faktor kontekstual yang memberikan wilayah yang menguntungkan bagi munculnya kelompok ekstremis yang keras, seperti: negara yang rapuh, kurangnya penegakan hukum, korupsi dan kriminalitas.

C. Definisi Operasional dan Indikator Radikalisme

Radikalisme merupakan sikap atau tindakan yang mengatasnamakan agama yang tidak sejalan dengan dasar atau prinsip dasar kehidupan berbangsa yang menjunjung tinggi toleransi dan terbuka terhadap sesama warga yang majemuk yang dijamin keberadaannya oleh konstitusi, atau yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemanusiaan. (*Wahid Foundation*, 2016). Sementara itu, dalam studi ini yang dimaksud dengan prinsip dasar kehidupan yang merupakan konsensus kebangsaan yakni nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika (Kemendikbud, 2016-Kurikulum-13)

Dari pengertian di atas, dalam kajian ini definisi operasional radikalisme di lingkungan sekolah adalah gagasan, sikap atau tindakan yang tidak sejalan atau bertentangan dengan prinsip dasar kehidupan berbangsa yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, serta menjunjung tinggi toleransi terhadap sesama

warga yang majemuk serta rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pada tingkat satuan pendidikan pengembangan nilai-nilai kehidupan berbangsa tersebut dilaksanakan melalui penguatan sikap dan tindakan (Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti dan SE Mendikbud 11 April 2017 perihal Implementasi PPK, dan Totok Suprayitno, 2017, Kurikulum 2013) dengan indikator kegiatan antara lain sebagai berikut..

1. Setiap kelas menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pagi pada awal KBM dan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan/nasional sebelum pulang (Permen/SE/Totok).
2. Melaksanakan Upacara/pengibaran bendera merah putih setiap Senin (Permen/Totok).
3. Membaca/memasang naskah Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 (SE/studi Cilacap, 2017).
4. Toleran terhadap kemajemukan-kebinekaan (SARA)-Setara (2016).
5. Kegiatan siswa lainnya untuk Penguatan paham Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika.

Selanjutnya, jika terdapat indikasi warga sekolah yang memiliki gagasan atau tindakan yang tidak sejalan atau bertentangan dengan prinsip dasar kehidupan berbangsa yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, serta menjunjung tinggi toleransi terhadap sesama warga yang majemuk serta rasa kebangsaan dan cinta tanah air, maka dapat diindikasikan sebagai radikalisme.

Tabel 2.1 Indikator Sikap/Tindakan Radikalisme di Lingkungan Sekolah

NO	ASPEK (Paham/Ideologi)	INDIKATOR (Sikap/Tindakan)
1	Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mau membaca/mengikuti pembacaan teks Panca-sila 2. Tidak mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila 3. Menggunakan ideologi lain
2	UUD 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mau membaca/mengikutiteks Pembukaan UUD45 2. Ingin mengganti teks Pembukaan UUD45 3. Lainnya
3	NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ingin negara kebangsaan 2. Tidak mau mengikuti upacara bendera 3. Tidak mau hormat bendera 4. Tidak mau menyanyikan lagu-lagu Kebangsaan
4	Bhineka Tunggal Ika (SAEA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intoleran 2. Menentang keberagaman SARA 3. Menentang persatuan Indonesia

D. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang utama dalam menangkal paham radikalisme di kalangan pelajar. Hal tersebut tercermin dari kurikulum PPKn 2013 pada silabus yang memuat rasional dan penjabaran kompetensi yang harus dicapai oleh siswa mencakup kompetensi terhadap pengetahuan, pemahaman dan sikap pada prinsip dasar kehidupan yang merupakan konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika

sebagai (Kemendikbud, 2016-Kurikulum-13), sebagai berikut.

1. Rasional

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki visi dan misi mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, melalui proses menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya; dan memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru; memahami dan menerapkan pengetahuan faktual dan konseptual tentang kewarganegaraan; dan menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual kewarganegaraan dengan terampil.

Untuk itu, di kembangkan substansi pembelajaran yang dijiwai oleh 4 (empat) konsensus kebangsaan yaitu 1) Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup; 2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai komitmen terhadap bentuk final Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia; (4) dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud kesadaran atas keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antar bangsa.

Kegiatan pembelajaran untuk mencapai penguasaan kompetensi pendidikan kewarganegaraan (sikap kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan, dan

keterampilan kewarganegaraan) sebagaimana termaktub dalam silabus menitikberatkan pada pembentukan karakter warga negara Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Depdiknas,2003). Pengembangan sikap kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan secara utuh menjadi karakter diorganisasikan melalui pengembangan dampak instruksional, dampak pengiring, dan budaya kewarganegaraan dalam lingkungan belajar yang menarik, menyenangkan, dan membelajarkan sepanjang hayat. Untuk itu perlu dikembangkan berbagai model pembelajaran dan lingkungan belajar di kelas, di luar kelas, dan/atau dalam masyarakat serta jaringan (virtual).

Pembelajaran PPKn dirancang sebagai wahana untuk mengembangkan keterampilan abad 21 melalui mata pelajaran PPKn serta memperkuat upaya perubahan cara pandang (*mindset*) para guru PPKn untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola dan mengembangkan pembelajaran PPKn.

Kompetensi, materi, dan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dikembangkan melalui pertimbangan kepentingan hidup bersama secara damai dan harmonis (*to live together in peace and harmony*). Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Penumbuhan dan pengembangan sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran, pembiasaan, keteladanan, dan pembudayaan untuk mengembangkan

karakter peserta didik lebih lanjut. Sekolah sebagai taman yang menyenangkan untuk tumbuh berkembangnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa yang menempatkan pengetahuan sebagai perilaku (*behavior*), tidak hanya berupa hafalan atau verbal.

Silabus mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA/SMK/MA/MAK ini disusun dengan format dan penyajian/penulisan yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh guru. Penyederhanaan format dimaksudkan agar penyajiannya lebih efisien, tidak terlalu banyak halaman namun lingkup dan substansinya tidak berkurang, serta tetap mempertimbangkan tata urutan (*sequence*) materi dan kompetensinya. Penyusunan silabus ini dilakukan dengan prinsip keselarasan antara ide, desain, dan pelaksanaan kurikulum; mudah diajarkan/dikelola oleh guru (*teachable*); mudah dipelajari oleh peserta didik (*learnable*); terukur pencapaiannya (*measurable assessable*), dan bermakna untuk dipelajari (*worth to learn*) sebagai bekal untuk kehidupan dan kelanjutan pendidikan peserta didik.

Silabus ini bersifat fleksibel, kontekstual, dan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran, serta mengakomodasi keungulan-keunggulan lokal. Atas dasar prinsip tersebut, komponen silabus mencakup Kompetensi Dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Uraian pembelajaran yang terdapat dalam silabus merupakan alternatif kegiatan yang dirancang berbasis aktivitas. Pembelajaran tersebut merupakan alternatif dan inspiratif sehingga guru dapat mengembangkan berbagai model yang sesuai dengan karakteristik masing-masing mata pelajaran. Dalam melaksanakan silabus ini guru diharapkan kreatif dalam

pengembangan materi, pengelolaan proses pembelajaran, penggunaan metode dan model pembelajaran, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat serta tingkat perkembangan kemampuan peserta didik.

2. Kompetensi Setelah Mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Pendidikan Dasar dan Menengah

Pendidikan PPKn di SMA/MA/SMK/MAK diharapkan dapat berfungsi sebagai menjadi wahana bagi peserta didik untuk mengimplementasikan sikap kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan PPKn di SMA/MA/SMK/MAK menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu memahami, meneledani, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pengetahuan yang dipelajari.

Kompetensi Setelah Mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Pendidikan Dasar dan Menengah untuk ruang lingkup Pancasila adalah:

- a. Menghayati dan bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; Menganalisis dan menerapkan keputusan bersama berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Mensyukuri dan mendukung perwujudan Pancasila sebagai dasar Negara; Menganalisis dan mendemonstrasikan langkah-langkah untuk mewujudkan Pancasila sebagai Dasar Negara.
- c. Menghayati dan menghargai nilai-nilai yang melekat dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila dalam kehi-

dupan berbangsa dan bernegara; Menganalisis dan menyaji nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kompetensi setelah mempelajari pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di pendidikan dasar dan menengah untuk lingkup Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah:

- a. Menghargai dan melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga Negara; merasionalkan dan menyajikan pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara terhadap kehidupan sehari-hari.
- b. Menghayati dan mempertahankan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jujur; mensintesis dan menerapkan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menghargai dan mendukung ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan Negara sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil; memahami dan mewujudkan prinsip-prinsip kedaulatan kedaulatan Negara sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Mensyukuri dan mendukung nilai-nilai yang menunjukkan perilaku orang beriman dalam praksis perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian; Memprediksi dan menalar hasil evaluasi

praksis (kehidupan nyata) perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian.

Kompetensi setelah mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di pendidikan dasar dan Menengah untuk ruang lingkup Bhinneka Tunggal Ika adalah:

- a. Mensyukuri dan bersikap toleran dalam keberagaman ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika; Menggali dan melaksanakan tanggungjawab terkait keberagaman ekonomi masyarakat.
- b. Peka/peduli dan memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) di masyarakat serta cara pemecahannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika; Menganalisis dan mendukung prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika; Menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan *gender* dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika; Peka/peduli dan menghargai pendapat berkaitan masalah-masalah yang muncul dalam bidang social, budaya, ekonomi dan gender di di masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika; Menganalisis dan Mendukung peran mediator penyelesaian masalah sosial, budaya, ekonomi, dan *gender* dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Menghayati dan membedakan nilai-nilai terkait pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK dengan senantiasa berlindung kepada Tuhan Yang

Maha Esa; Mengkontraskan dan menyaji hasil evaluasi pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Kompetensi setelah mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di pendidikan dasar dan menengah untuk ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:

- a. Meyakini dan mendukung dengan rasa tanggung jawab persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa; Menelaah dan mendemonstrasikan dampak persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Menghargai dan mendukung konsep bela Negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mendukung konsep bela Negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mengkreasi-kan dan mendemonstrasikan konsep cinta tanah air/bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dengan jujur di masa yang akan datang sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mengevaluasi dan mendemonstrasikan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kompetensi Setelah Mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan

Kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kompetensi yang Harus Dicapai Peserta Didik

No	Ruang Lingkup	Kompetensi yang harus dicapai
1	Pancasila	Menghayati, menghargai, menganalisis dan me-nyaji nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone-sia Tahun 1945	Mensyukuri, mendukung, memprediksikan dan menalar hasil evaluasi praksis (kehidupan nyata) perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian
3	Bhinneka Tunggal Ika	Menghayati, membedakan, mengkontraskan dan menyaji hasil evaluasi pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
4	Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mengembangkan, mempertahankan, mengevaluasi dan mendemonstrasikan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. Kerangka Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan

Kompetensi Dasar mata pelajaran PPKn disusun sesuai dengan Kompetensi Inti tiap kelas. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut:

- a. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;
- b. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;
- c. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan
- d. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.

Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Pengorganisasian ruang lingkup materi PPKn dikembangkan sesuai dengan prinsip mendalam dan meluas, mulai dari jenjang SD/MI sampai dengan jenjang SMA/MA/SMK. Prinsip mendalam berarti materi PPKn dikembangkan dengan materi pokok sama, namun semakin tinggi tingkat kelas atau jenjang semakin mendalam pembahasan materi. Prinsip meluas berarti lingkungan materi dari keluarga, teman pergaulan, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara, serta pergaulan dunia. Kedalaman dan keluasan materi dapat dilihat dari rumusan kompetensi dasar.

Kerangka Pengembangan Kurikulum PPKn SMA/MA/SMK/MAK Kelas X sd XII mengikuti elemen pengorganisasi Kompetensi Dasar yaitu Kompetensi Inti. Kompetensi Inti pada kelas Kelas X, XI, dan XII sebagai berikut.

Tabel 2.3 Kompetensi Inti SMA/MA/SMK/MAK Kelas X, XI, dan XII

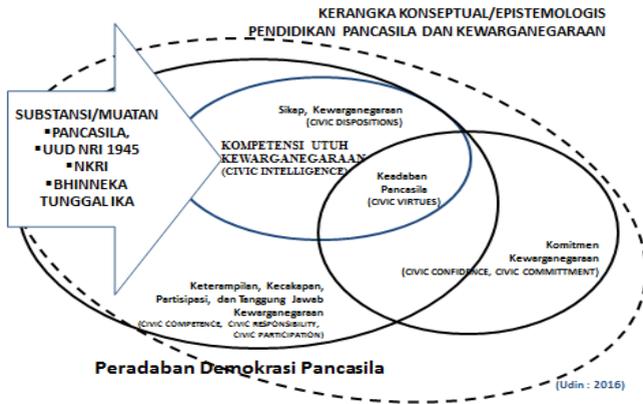
Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
<p>KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.</p> <p>KI.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.</p>	<p>KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.</p> <p>KI.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.</p>	<p>KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.</p> <p>KI.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.</p>

Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
<p>KI.3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.</p>	<p>KI.3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.</p>	<p>KI.3 Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.</p>
<p>KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai keilmuan</p>	<p>KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metoda sesuai keilmuan.</p>	<p>KI.4 Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.</p>

Kurikulum PPKn pendidikan dasar dan pendidikan menengah disusun dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa.
- b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia.
- d. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kerangka Konseptual PPKn, secara epistemologis PPKn dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Materi PPKn

Peta Materi PPKn pada SMA/MA/SMK/MAK sebagai berikut.

Tabel 2.4 Peta Materi PPKn SMA/MA/SMK/MAK

Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
<p>1. Nilai-Nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p> <p>2. Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan</p> <p>3. Kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>4. Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>5. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p>	<p>1. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila.</p> <p>2. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4. Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>5. Kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p>	<p>1. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara</p> <p>2. Pelindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian</p> <p>3. Pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>4. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>

Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
<p>6. Indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, social, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>7. Arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	<p>6. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	

5. Pembelajaran dan Penilaian

a. Pembelajaran

Pendekatan *Pembelajaran Berbasis Proses Keilmuan (Scientific Approach)* yang dipersyaratkan dalam kurikulum 2013 memusatkan perhatian pada proses pembangunan pengetahuan (KI-3), keterampilan (KI-4), sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) melalui transformasi pengalaman empirik dan pemaknaan konseptual. Pendekatan tersebut memiliki langkah generik sebagai berikut:

- 1) Mengamati (*observing*),
- 2) Menanya (*questioning*),
- 3) Mengeksplorasi/mencoba (*exploring*),
- 4) Mengasosiasi/menalar (*assosiating*)
- 5) Mengkomunikasikan (*comunicating*)

Pada setiap langkah dapat diterapkan model pembelajaran yang lebih spesifik, misalnya:

- 1) untuk mengamati antara lain dapat menggunakan model menyimak dengan penuh perhatian;
- 2) untuk menanya antara lain dapat menggunakan model bertanya dialektis/mendalam;
- 3) untuk mengeksplorasi antara lain dapat menggunakan model kajian dokumen historis;
- 4) untuk menalar antara lain dapat menggunakan model diskusi peristiwa publik;
- 5) untuk mengkomunikasikan antara lain dapat menggunakan model presentasi gagasan di depan publik (*public hearing*).

Kegiatan belajar dan pembelajaran menekankan pada hal-hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan rasa keingintahuan (*Foster a sense of wonder*) terkait hal-hal baik yang bersifat empirik maupun konseptual;
- 2) Meningkatkan keterampilan mengamati (*Encourage observation*) dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya yang bersifat kasat mata tetapi juga yang syarat makna;
- 3) Melakukan analisis (*Push for analysis*) untuk mendapatkan keyakinan nilai dan moral yang berujung pada pemilikan karakter tertentu
- 4) Berkomunikasi (*Require communication*), baik yang bersifat intrapersonal (berkomunikasi dalam dirinya)/kontemplasi maupun interpersonal mengenai hal yang terpikirkan maupun yang bersifat meta kognitif.
- 5) Pembelajaran PPKn di SD/MI dilaksanakan menggunakan pendekatan tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan. Tema merajut makna berbagai konsep dasar sehingga peserta didik tidak belajar konsep dasar secara parsial. Dengan demikian pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia

b. Penilaian

1) Penilaian Sikap

Kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual (ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan; dan toleransi dalam beribadah) yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial (jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri) yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Penilaian sikap PPKn di SMA/SMK/MA/MAK dilakukan oleh guru mata pelajaran PPKn, Teknik penilaian yang digunakan meliputi: observasi, wawancara, catatan anekdot (*anecdotal record*), catatan kejadian tertentu (*incidental record*) sebagai unsur penilaian utama. Sedangkan teknik penilaian diri dan penilaian antar-teman (*peer evaluation*) dapat dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Penilaian yang utama dilakukan oleh guru kelas melalui observasi selama periode tertentu dan penilaian sikap tidak dilaksanakan pada setiap kompetensi dasar (KD). Penilaian sikap dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, dan tidak hanya di dalam kelas. Hasil penilaian sikap berupa

deskripsi yang menggambarkan perilaku peserta didik.

c. Penilaian Pengetahuan

Pengetahuan yang akan dinilai pada PPKn di SMA/SMK/MA/MAK di berkaitan dengan Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara; Pelindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian; Pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika; Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

d. Penilaian Keterampilan

Penilaian kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Perkembangan pencapaian kompetensi keterampilan melalui tahapan mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta. Gradasi pencapaian kompetensi keterampilan mata pelajaran PPKn pada jenjang SMA/MA/SMK/MAK adalah mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta.

Teknik penilaian kompetensi keterampilan menggunakan tes praktik, proyek, dan portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang dilengkapi rubric.

6. Kontekstualisasi Pembelajaran Sesuai dengan Kondisi Lingkungan dan Peserta Didik

Kegiatan pembelajaran pada silabus ini dapat disesuaikan dan diperkaya dengan konteks daerah atau sekolah, serta konteks global untuk mencapai kualitas optimal hasil belajar pada peserta didik terhadap Kompetensi Dasar. Kontekstualisasi pembelajaran tersebut agar peserta didik tetap berada pada budayanya, mengenal dan mencintai alam dan sosial di sekitarnya, dengan perspektif global sekaligus menjadi pewaris bangsa sehingga akan menjadi generasi tangguh dan berbudaya Indonesia.

Dalam konteks pembelajaran PPKn lingkungan (alam, sosial, budaya, dan spiritual) merupakan kelas global yang terbuka (*open global classroom*) yang berfungsi sebagai sumber belajar. Oleh karena itu, guru PPKn harus selalu berupaya untuk memanfaatkan lingkungan dalam rangka memberikan pengalaman belajar (*learning experience*) peserta didik dengan memberikan tugas belajar (*learning task*) yang digali dari lingkungan belajar dengan prinsip semakin meluas (*expanding environment approach*) misalnya dengan kegiatan karyawisata/studiwisata, dan proyek belajar kewarganegaraan.

Saat ini dunia pendidikan sedang berada dalam abad teknologi dan informasi. Peserta didik yang ada dalam satuan pendidikan mulai dari SD/MI sampai dengan SMA/MA selain sebagai warga negara juga sudah menjadi warga jaringan (*netizen*) yang aktif menjadi media teknologi komunikasi seperti dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sudah menjadi bagian dari komunitas *technology natives* (pengguna asli teknologi) karena sejak lahir sudah berinteraksi dalam era teknologi. Sementara itu para guru sebagian besar masih

termasuk kategori pendatang baru (migran) ke dunia baru TI (Teknologi Informasi). Oleh karena itu, diperlukan pelatihan pemanfaatan TI bagi guru PPKn agar mampu mengelola pembelajar PPKn dalam konteks dinamika kehidupan abad ke 21- abad TI.

Namun demikian, tidaklah berarti bahwa sumber belajar yang sudah ada, yang sering juga disebut konvensional/nonteknologi seperti Buku Teks dan Lembar Kerja Siswa (LKS) tidak lagi diperlukan. Justru dengan bantuan TI, Buku dan LKS bentuk dan formatnya harus mengakomodasikan TI. Dengan mengembangkan Buku dan LKS menjadi bagian dari media belajar kombinasi konvensional dan TI. Perlu ditekankan bahwa LKS jangan/bukan hanya sekedar kumpulan soal, melainkan harus dikembangkan menjadi media belajar yang memungkinkan peserta didik melakukan kegiatan belajar menganalisis, menerapkan dan melakukan kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). Dalam konteks itu guru PPKn harus dibekali dengan kemampuan memanfaatkan TI dalam menggunakan atau mengembangkan LKS dan menulis Buku pengayaan. Selain itu dengan mulai terbukanya sumber belajar bebas (*open education resources*) baik nasional maupun global, guru PPKn harus berupaya memanfaatkan jaringan internet dalam pembelajaran dengan mengembangkan pembelajaran berbasis jaringan (pembelajaran daring). Dengan demikian pembelajaran PPKn menjadi proses belajar yang terpadu/teraduk (*blended learning*).

E. Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti

Selain PPKn, Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti juga merupakan mata pelajaran yang utama dalam menangkal paham radikalisme di kalangan pelajar. Hal

tersebut tercermin dari kurikulum PAI dan Budi Pekerti yang memuat rasional dan penjabaran kompetensi yang harus dicapai oleh siswa yang dikembangkan dengan memperhatikan nilai-nilai Islam rahmatan lilalamin yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam yang humanis, sebagai berikut.

1. Rasional

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti merupakan pendidikan yang secara mendasar menumbuh kembangkan akhlak peserta didik melalui pembiasaan dan pengamalan ajaran Islam secara menyeluruh (kaffah). Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai suatu mata pelajaran diberikan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK, baik yang bersifat kokurikuler maupun ekstrakurikuler.

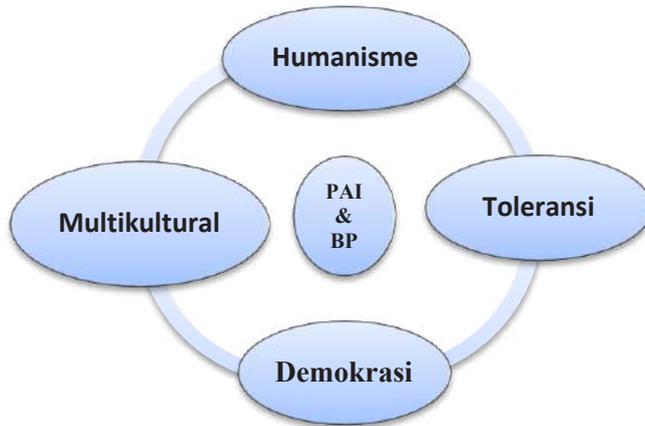
Kompetensi, materi, dan pembelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dikembangkan melalui pertimbangan kepentingan hidup bersama secara damai dan harmonis (*to live together in peace and harmony*). Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Penumbuhan dan pengembangan sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran, pembiasaan, keteladanan, dan pembudayaan untuk mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Sekolah sebagai taman yang menyenangkan untuk tumbuh berkembangnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa yang menempatkan pengetahuan sebagai perilaku (*behavior*), tidak hanya berupa hafalan atau *verbal*.

PAI dan Budi Pekerti berlandaskan pada aqidah Islam yang berisi tentang keesaan Allah SWT. sebagai sumber utama nilai-nilai kehidupan bagi manusia dan alam

semesta. Sumber lainnya adalah akhlak yang merupakan manifestasi dari aqidah, yang sekaligus merupakan landasan pengembangan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti merupakan pendidikan yang ditujukan untuk dapat mensesuaikan, menselaraskan dan menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan yang diwujudkan dalam:

- a. membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. serta berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur (Hubungan manusia dengan Allah SWT.);
- b. menghargai, menghormati dan mengembangkan potensi diri yang berlandaskan pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan (Hubungan manusia dengan diri sendiri);
- c. menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama serta menumbuhkan kembangkan akhlak mulia dan budi pekerti luhur (Hubungan manusia dengan sesama); dan
- d. penyesuaian mental keislaman terhadap lingkungan fisik dan sosial (Hubungan manusia dengan lingkungan alam).

Berdasarkan penjelasan di atas, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dikembangkan dengan memperhatikan nilai-nilai Islam rahmatan lilalamin yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam yang humanis, toleran, demokratis, dan multikultural.



Gambar 2.2 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Islam yang humanis berarti memandang kesatuan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, memiliki asal-usul yang sama, menghidupkan rasa peri kemanusiaan, dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Nilai-nilai Islam humanis yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta didik SMA/MA/SMK/MAK di antaranya adalah: berprasa-sangka baik, disiplin, jujur, berbuat baik kepada sesama manusia, dan berlaku adil.

Islam yang toleran mengandung arti bersikap menghargai pendapat, pandangan, kepercayaan, atau kebiasaan yang berbeda dengan pendirian seseorang, juga tidak memaksa, tetap berlaku baik, lemah lembut, dan saling memaafkan. Nilai-nilai Islam toleran yang

dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta didik SMA/MA/SMK/MAK di antaranya adalah: berprasangka baik, hidup rukun, dan menjaga persatuan.

Demokratis berarti yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi sesama dengan mengutamakan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan mengemukakan pendapat sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Nilai-nilai Islam demokratis yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta didik SMA/MA/SMK/MAK di antaranya adalah: kontrol diri, disiplin, bertanggung jawab, berkompetisi dalam kebaikan, berpikir kritis, dan menjaga persatuan.

Multikultural berarti bersikap mengakui, mengakomodatif, dan menghormati perbedaan dan keragaman budaya, untuk mencari dan memudahkan hubungan sosial, serta gotong royong demi mencapai kebaikan bersama. Nilai-nilai multikultural dalam Islam yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta didik SMA/MA/SMK/MAK di antaranya adalah: berprasangka baik, persaudaraan, hidup rukun, menghindari tindak kekerasan, saling menasehati, menjaga persatuan, dan hidup damai dalam keberagaman.

Kompetensi, materi, dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dikembangkan melalui pertimbangan kepentingan hidup bersama secara damai dan harmonis (*to live together in peace and harmony*). Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstra kurikuler. Penumbuhan dan pengembangan sikap

dilakukan sepanjang proses pembelajaran, pembiasaan, keteladanan, dan pembudayaan untuk mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Sekolah sebagai taman yang menyenangkan untuk tumbuh berkembangnya sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang menempatkan pengetahuan sebagai perilaku (*behavior*), tidak hanya berupa hafalan atau verbal.

Silabus ini disusun dengan format dan penyajian/penulisan yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh guru. Penyederhanaan format dimaksudkan agar penyajiannya lebih efisien, tidak terlalu banyak halaman namun lingkup dan substansinya tidak berkurang, serta tetap mempertimbangkan tata urutan (*sequence*) materi dan kompetensinya. Penyusunan silabus ini dilakukan dengan prinsip keselarasan antara ide, desain, dan pelaksanaan kurikulum; mudah diajarkan oleh guru (*teachable*); mudah dipelajari oleh peserta didik (*learnable*); terukur pencapaiannya (*measurable*), dan bermakna untuk dipelajari (*worth to learn*) sebagai bekal untuk kehidupan dan kelanjutan pendidikan peserta didik.

Silabus ini bersifat fleksibel, kontekstual, dan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran, serta mengakomodasi keungulan-keunggulan lokal. Atas dasar prinsip tersebut, komponen silabus mencakup kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Uraian pembelajaran yang terdapat dalam silabus merupakan alternatif kegiatan yang dirancang berbasis aktivitas. Pembelajaran tersebut merupakan alternatif dan inspiratif sehingga guru dapat mengembangkan berbagai model yang sesuai dengan karakteristik masing-masing mata pelajaran. Dalam melaksanakan silabus ini guru diharapkan kreatif dalam

pengembangan materi, pengelolaan proses pembelajaran, penggunaan metode dan model pembelajaran, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat serta tingkat perkembangan kemampuan kemampuan peserta didik.

2. Kompetensi Setelah Mempelajari Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Pendidikan Dasar dan Menengah

PAI dan Budi Pekerti dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam hal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan ini kemudian dirumuskan secara khusus dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai berikut;

- a. menumbuh kembangkan aqidah melalui pemberian, pembinaan, dan pengembangan pengetahuan, penghayat-an, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang Agama Islam sehingga menjadi muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT; dan
- b. mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (*tasamuh*), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam kehidupan sebagai warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.

Kompetensi setelah mempelajari Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

Tabel 2.5 Kompetensi PAI dan BP

Kelas X-XII	
1. <i>Al-Qu'an</i>	Meyakini, membaca, menghafal, dan menganalisis ayat-ayat pilihan, menyajikan hubungan ayat-ayat tersebut dengan kehidupan sehari-hari dan dapat berperilaku sesuai kandungan ayat.
2. Aqidah	Meyakini, mengamalkan, menganalisis makna Iman kepada Allah, dan Malaikat Allah SWT. Serta dapat menyajikan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari.
3. Akhlak	Meyakini, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam, manfaat kejujuran dan semangat keilmuan dan menyajikan keutamaannya, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Fiqh	Meyakini, menganalisis, mendiskripsikan kedudukan al-Qur'an, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dan hikmah ibadah haji, zakat, wakaf serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam tersebut.
5. Sejarah Peradaban Islam	Meyakini, menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah dan Madinah, serta meneladaninya.

3. Kerangka Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti diberikan sejak SD sampai SMA/MA/SMK/MAK sebagai mata

pelajaran, dan nilai-nilainya terintegrasi dalam proses pembelajaran di sekolah.

Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti diperkuat melalui pengkondisian aktivitas berupa interaksi peserta didik baik di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan pergaulan dunia yang terintegrasi dalam proses pembelajaran di kelas.

Kerangka pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada SMA/MA/SMK/MAK mengikuti elemen pengorganisasian Kompetensi Dasar yang mengacu pada Kompetensi Inti (KI) berikut ini.

Tabel 2.6 Kerangka Kurikulum PAI dan BP

KI	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
1	<p>Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya</p> <p>Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia</p>	<p>Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya</p> <p>Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia</p>	<p>Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya</p> <p>Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia</p>
2	<p>Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan</p>	<p>Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,</p>	<p>Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan</p>
3	<p>Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan</p>	<p>Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,</p>	<p>Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan</p>

KI	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
	<p>kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah</p>	<p>kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah</p>	<p>wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah</p>
4	<p>Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan</p>	<p>Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan</p>	<p>Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan</p>

Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA/MA/SMK/MAK meliputi:

- a. *Al-Qur'an* dan Hadis
- b. Keimanan
- c. Akhlak
- d. Fiqh
- e. Sejarah Peradaban Islam

Peta materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA/MA/SMK/MAK meliputi:

Tabel 2.7 Peta Materi PAI dan BP

Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
<p>1. <i>Q.S. al-Hujurat/49: 10 dan 12 Q.S. al-Isra/17: 32, serta hadis tentang kontrol diri (mija hadah an-nafs), prasangka baik (husnuzzan), dan persaudaraan (ukhuwah).</i></p> <p>2. <i>Q.S. an-Nur/24: 2, serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina</i></p>	<p>1. <i>Q.S. al-Maidah/5 : 48; Q.S. an-Nisa/4: 59, dan Q.S. at-Taubah/9 : 105</i> serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja,</p> <p>2. <i>Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. al-Maidah/5 : 32</i> serta hadis tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan.</p>	<p>1. <i>Q.S. Ali Imran/3: 190-191, dan Q.S. Ali Imran/3: 159</i> serta hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis</p> <p>2. <i>Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-Baqarah/2: 83, serta hadis tentang kewajiban-anberibadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia</i></p>
<p>3. Iman kepada Allah (penghayatan al-Asma'u al-Husna al-Karim, al-Mu'min, al-Wakil, al-Matin, al-Jami', al-'Adl, dan al-Akhir), dan Iman kepada Malaikat Allah SWT.</p>	<p>3. Iman kepada Kitab Allah, dan Rasul Allah Swt.</p>	<p>3. Iman kepada hari akhir, qada dan qadar.</p>
<p>4. Berpakaian sesuai syariat Islam, jujur dan semangat keilmuan.</p>	<p>4. Sya'ah, kejujuran, hormat dan patuh kepada orangtua dan guru.</p>	<p>4. Bekerja keras dan bertanggung jawab.</p>
<p>5. Kedudukan Al-Qur'an, Hadis, dan ijihad sebagai sumber hukum Islam,</p>	<p>5. Pengurusan jenazah, khutbah, dakwah, tabligh, dan prinsip-prinsip</p>	<p>5. Pernikahan dalam Islam dan pembagian waris.</p>

Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
<p>haji, zakat, dan wakaf.</p> <p>6. Substansi dan strategi keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah dan Madinah.</p>	<p>ekonomi Islam.</p> <p>6. Substansi dan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dan perkembangan Islam pada masa modern.</p>	<p>6. Substansi dan perkembangan peradaban Islam di Indonesia dan peradaban Islam dunia</p>

1. Pembelajaran dan Penilaian

a. Pembelajaran

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan). Di samping itu, pembelajaran juga dapat dilakukan dengan berbagai macam model dan pendekatan sesuai dengan karakteristik materi yang dibelajarkan dan kompetensi yang akan dicapai.

Berikut ini dikemukakan beberapa contoh model pembelajaran dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dalam pembelajaran *al-Qur'an* dapat digunakan metode Mencari Pasangan (*Make a Match*) dalam menentukan ayat dan terjemahannya. Dalam pembelajaran aqidah dapat digunakan metode Penemuan (*Inquiry*) dalam mencari bukti-bukti kekuasaan Allah SWT. Dalam pembelajaran akhlak dapat digunakan metode Bermain Peran (*role playing*) dalam mencontohkan perilaku terpuji. Dalam pembelajaran fiqh dapat digunakan metode Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based Learning*) dalam menentukan dampak zakat terhadap peningkatan ekonomi kaum dhuafa. Dalam pembelajaran Sejarah Peradaban Islam dapat digunakan metode Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem Based Learning*) dalam meminimalisir dampak radikalisme. Contoh penggunaan model-model pembelajaran tersebut tidak baku, tetapi harus disesuaikan dengan karakteristik materi pembelajaran.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dapat dilaksanakan dengan menggunakan berbagai metode dan strategi yang tepat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama. Dalam metode *problem based learning* misalnya, pendidik dapat menanamkan nilai-nilai kerjasama, gotong-royong, kerukunan dan demokrasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam *Small group discussion* (diskusi kelompok kecil), pendidik dapat menanamkan nilai percaya diri dalam berpendapat, bertanggung jawab, dan menghargai pendapat orang lain, tetapi tetap menjaga nilai multikulturalisme dengan toleransi yang tinggi dalam hidup bermasyarakat yang lebih luas. Dengan metode *role playing* (bermain peran) sebagai *muzakki* (pemberi zakat) dan *mustahiq* (penerima zakat) dalam pembelajaran Fiqih tentang zakat, pendidik dapat menanamkan nilai-nilai kepedulian dan empati kepada sesama, persaudaraan, di samping ajaran tentang kerja keras dan cerdas untuk dapat menjadi *muzakki* serta penciptaan ekonomi yang berkeadilan.

Selain itu, pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dapat juga dikemas melalui multimedia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh: al-Qur'an, aqidah, akhlak, fiqih dan sejarah peradaban Islam dapat dikemas sedemikian rupa dalam web secara terpadu. Bahan-bahan materinya dapat berupa berbagai macam media seperti bahan teks, gambar, suara, video, animasi, simulasi dan sebagainya. Materi-materi tersebut dapat dipadukan ke dalam satu-dua media atau semua media (multimedia).

Pengembangan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dapat juga dikemas secara interaktif dan menarik. Salah satu caranya adalah dengan menintegrasikan berbagai macam media sehingga siswa dapat memilih apa yang akan dikerjakan selanjutnya, bertanya, dan mendapatkan jawaban melalui pemanfaatan komputer. Dengan demikian siswa memiliki kebebasan belajar sesuai dengan keinginannya. Hal ini dimaksudkan agar belajar menjadi tidak monoton, menegangkan dan menegangkan.

Kebutuhan peserta didik harus juga menjadi pertimbangan dalam pembelajaran. Pada umumnya ada tiga tipe pembelajar, yaitu auditory, visual, dan kinestetik. Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, pendidik dituntut untuk dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang karakteristiknya beragam. Dengan demikian, pendidik Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti telah mengimplementasikan ajaran Islam tentang keadilan, berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, responsif, dan nilai-nilai lain dalam ajaran Islam yang humanis.

b. Penilaian

Aspek yang dinilai pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal catatan guru. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, observasi terhadap diskusi, tanya jawab dan percakapan, serta penugasan. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui unjuk kerja/praktik, proyek, produk, dan portofolio.

Sebagai ilustrasi, berikut ini dikemukakan beberapa contoh teknik penilaian. Dalam penilaian al-Qur'ān dapat digunakan teknik penilaian praktik membaca *al-Qur'ān*, komponen yang dinilai meliputi: cara membaca (pengucapan huruf, panjang pendek bacaan) dan adab membaca. Dalam penilaian aqidah dapat digunakan teknik penilaian diri terhadap pengamalan keyakinan. Dalam penilaian akhlak dapat digunakan teknik penilaian observasi. Dalam penilaian fiqh dapat digunakan teknik penilaian praktik ibadah. Dalam penilaian sejarah peradaban Islam dapat digunakan teknik penilaian proyek.

2. Kontekstualisasi Pembelajaran Sesuai dengan Kondisi Lingkungan dan Peserta Didik

Indonesia sebagai negara kesatuan yang terdiri atas berbagai suku bangsa, agama, budaya, ras, dan kelas sosial merupakan kekayaan yang patut disyukuri dan dipelihara agar tetap menjadi sumber kekuatan. Jika tidak disikapi dengan bijak, keberagaman itu dapat menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, berbagai kearifan lokal yang telah mengakar di masyarakat harus dipelihara dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Islam yang humanis, toleran, demokratis, multikultural, dan berwawasan kebangsaan.

Sejalan dengan karakteristik pendidikan abad 21 yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Kurikulum 2013 juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media dan sumber belajar. Pemanfaatan TIK mendorong peserta didik dalam mengembangkan kreativitas dan berinovasi

serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti buku teks yang tersedia dalam bentuk buku guru dan buku siswa. Sesuai dengan Karakteristik Kurikulum 2013, buku teks bukan satu-satunya sumber belajar. Guru dapat menggunakan buku pengayaan atau referensi lainnya dan mengembangkan bahan ajar sendiri seperti LKS (Lembar Kerja Siswa). Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, LKS bukan hanya kumpulan soal.

F. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

Pendidikan karakter merupakan bagian sentral dari upaya penumbuhan budi pekerti dan karakter peserta didik antara lain memperkuat nilai-nilai nasionalisme dan relegius serta toleransi sehingga akan terhindar dari paham yang mengarah pada radikalisme. Berikut disampaikan upaya pemerintah melalui PPK (Kemendikbud, 2016) ----- sebagai berikut.

1. Kebijakan PPK

Penguatan karakter bangsa menjadi salah satu butir Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Komitmen ini ditindak lanjuti dengan arahan Presiden kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengutamakan dan membudayakan pendidikan karakter di dalam pendidikan. Atas dasar ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) secara bertahap mulai Tahun Ajaran 2016.

Kebijakan tersebut sekaligus sebagai usaha keberlanjutan dan pemusatan pendidikan karakter di jantung pendidikan sehingga semakin kuat ketika pada tahun 2010 pemerintah Indonesia telah mencanangkan sekaligus melaksanakan kebijakan Gerakan Nasional Pendidikan Karakter berlandaskan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pendidikan Karakter Bangsa. berlandaskan Nawacita. Sebagai pengejawantahan Gerakan Nasional Revolusi

Lebih lanjut, Gerakan PPK perlu mengintegrasikan, memperdalam, memperluas, dan sekaligus menyelaraskan berbagai program dan kegiatan pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan sampai sekarang. Dalam hubungan ini pengintegrasian dapat berupa pemaduan kegiatan kelas, luar kelas di sekolah, dan luar sekolah (masyarakat/komunitas); pemaduan kegiatan intra kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler; pelibatan secara serempak warga sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Perdalam dan perluasan tersebut dapat berupa penambahan dan pengintensifan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengembangan karakter siswa, penambahan dan pemajangan kegiatan belajar siswa, dan pengaturan ulang waktu belajar siswa di sekolah atau luar sekolah; kemudian penyelerasan dapat berupa penyesuaian tugas pokok guru, Manajemen Berbasis Sekolah, dan fungsi Komite Sekolah dengan kebutuhan Gerakan PPK. Diharapkan, Gerakan PPK merupakan jalan perwujudan Nawacita dan Gerakan Revolusi Mental di samping menjadi poros kegiatan pendidikan yang berujung pada terciptanya revolusi karakter bangsa.

2. Nilai Utama

Gerakan PPK menempatkan nilai karakter sebagai dimensi terdalam pendidikan yang membudayakan dan memberadabkan. Ada 5 nilai utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai karakter yang perlu dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK . Kelima nilai utama karakter bangsa yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. **Nilai Karakter Religius:** mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku untuk melaksanakan ajaran sesama, dan individu dengan alam semesta (lingkungan). Nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam perilaku mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan. ubnilai religius: cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama lintas agama, anti buli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, melindungi yang kecil dan tersisih.
- b. **Nilai Karakter Nasionalis:** merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. Nilai Karakter Mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita.

- c. **Nilai kemandirian:** antara lain etos kerja (kerja keras), tangguh tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- d. **Nilai Karakter Gotong Royong:** mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, bersahabat dengan orang lain dan memberi bantuan pada mereka yang miskin, tersingkir dan membutuhkan pertolongan. Subnilai gotong royong antara lain menghargai, kerjasama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, solidaritas, empati, anti Diskriminasi, anti kekerasan, sikap kerelawanan.
- e. **Nilai Karakter Integritas:** merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral). Karakter integritas meliputi sikap tanggungjawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Subnilai integritas antara lain kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggungjawab, keteladanan, menghargai martabat individu (terutama penyandang).

3. Fokus Gerakan PPK

Gerakan PPK berfokus pada struktur yang sudah ada dalam system pendidikan nasional. Terdapat tiga struktur yang dapat digunakan sebagai wahana, jalur,

dan medium untuk memperkuat pendidikan karakter bangsa, yaitu Struktur Program: jenjang dan kelas, ekosistem sekolah, penguatan kapasitas guru.

Struktur Kurikulum: merupakan kegiatan pembelajaran terintegrasi dalam kurikulum (intra-kurikuler) dan ko-kurikuler, ekstra kurikuler, dan non-kurikuler;

Struktur Kegiatan: berbagai macam kegiatan dan program yang mampu menyinergikan 4 (empat) dimensi pengolahan karakter Ki Hajar Dewantara (olahraga, olah pikir, olah rasa, dan olah hati).

a. Struktur Program

Struktur program meliputi jenjang dan kelas yaitu difokuskan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang lebih dikenal sebagai pendidikan dasar. Di samping itu fokus dilakukan pada sistem formal yaitu persekolahan karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang lebih memiliki akses terhadap sistem persekolahan ini.

Pelaksanaan Gerakan PPK pada tiap jenjang melibatkan dan memanfaatkan ekosistem pendidikan yang ada di lingkungan sekolah. Pemanfaatan dan pelibatan ekosistem pendidikan memperkuat dimensi lokal kontekstual pendidikan di daerah sehingga Gerakan PPK tidak lepas atau tercerabut dari nilai-nilai karakter yang tumbuh kembang pada ekosistem pendidikan yang sudah ada. Berbagai pemangku kepentingan yang ada pada ekosistem pendidikan tersebut ikut serta dan bersama-sama bertanggungjawab dan bersinergi untuk memperkuat pembentukan karakter sebagai modal dasar untuk mewujudkan warga masyarakat yang lebih

berbudaya dan memiliki jatidiri bangsa di masa mendatang.

Pelaku kunci dalam Gerakan PPK adalah Kepala Sekolah, Guru, tenaga kependidikan, tenaga non-kependidikan, orang tua, Komite sekolah dan pemangku kepentingan lain yang relevan dalam pengembangan PPK. Masing-masing perlu memahami kembali tugas dan fungsinya dalam rangka keberhasilan PPK. Lebih dari itu, kehadiran orang dewasa dilingkungan pendidikan adalah sebagai guru, yaitu mereka yang digugu (diikuti) dan ditiru (diteladani) oleh para siswa. Ini berlaku bagi siapapun yang terlibat dalam kegiatan pendidikan.

b. Struktur Kurikulum

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) tidak mengubah kurikulum yang sudah ada, melainkan optimasi kurikulum pada satuan pendidikan. Gerakan PPK perlu dilaksanakan di satuan pendidikan melalui berbagai cara sesuai dengan kerangka kurikulum yaitu alokasi waktu minimal yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola oleh satuan pendidikan sesuai dengan kearifan dan kebijaksanaan satuan pendidikan masing-masing. Kurikulum yang menerapkan PPK disesuaikan dengan keberagaman kondisi daerah dan karakteristik satuan pendidikan.

Pelaksanaan Gerakan PPK disesuaikan dengan kurikulum pada satuan pendidikan masing-masing dan dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu:

- 1) Mengintegrasikan/mengkontekstualisasikan mata pelajaran yang ada di struktur kurikulum dan Mata Pelajaran Muatan Lokal melalui kegiatan intrakurikuler dan ko-kurikuler. Sebagai kegiatan

intrakurikuler dan ko-kurikuler maka setiap guru menyusun dokumen perencanaan pembelajaran berupa silabus dan RPP sesuai matapelajarannya masing-masing. Nilai-nilai Utama PPK diintegrasikan ke dalam Mata Pelajaran sesuai topik Utama Nilai PPK pada hari itu dan sesuai dengan karakteristik Mata Pelajaran. Misalnya Mata Pelajaran IPA untuk SMP mengintegrasikan Nilai Nasionalisme dengan mendukung konservasi energi pada materi tentang Energi.

- 2) Mengimplementasikan PPK melalui kegiatan ekstrakurikuler, baik ekstrakurikuler wajib dan pilihan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Pada kegiatan ekstrakurikuler maka Satuan Pendidikan melakukan penguatan kembali kegiatan-kegiatan ekskul dan menambah kegiatan-kegiatan lain yang memberikan ruang kepada siswa untuk produktif. Kegiatan ekskul dapat dilakukan dengan menggerakkan sumber daya sekolah yang ada, dengan kolaborasi dengan masyarakat dan juga pihak-pihak atau lembaga lain seperti PMI, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Museum, Rumah Budaya, dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan dan kreatifitas Satuan Pendidikan.
- 3) Melalui kegiatan pembiasaan yang dilakukan melalui budaya sekolah, baik melalui kegiatan rutin, spontan, pengkondisian, serta melalui keteladanan orang dewasa di lingkungan sekolah. Kegiatan-kegiatan selepas jam sekolah diadakan untuk memperkuat pembentukan karakter disesuaikan dengan situasi, kondisi, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di unit sekolah

dan potensi lingkungan sekitar sebagai sumber pembelajaran.

Dalam pelaksanaannya, satuan pendidikan perlu menyesuaikan Kurikulum Sekolah mereka dengan mengacu pada nilai-nilai utama PPK dengan menyusun kembali dokumen I KTSP, silabus, dan RPP, serta program-program sekolah yang dimasukkan dalam kalender pendidikan.

Selain struktur dalam kurikulum, Gerakan PPK juga memiliki struktur pendukung lain yang terdiri atas sebagai berikut:

- 1) Kokurikuler dan Ekstrakurikuler, merupakan kegiatan yang bersifat penambahan, pengayaan, dan perluasan dari kegiatan pembelajaran intrakurikuler, yang juga bersifat menyenangkan dan dapat mengaktualisasikan nilai-nilai karakter. Contoh: kepramukaan, PMR, OSIS, olahraga, kesenian, dan lain sebagainya.
- 2) Ekosistem dan budaya sekolah, mewujudkan tata kelola yang sehat, hubungan antar warga sekolah yang harmonis dan saling menghargai, lingkungan sekolah yang bersih, ramah, sehat dan bersahabat.
- 3) Pendidikan di keluarga dan masyarakat, menjalin keselarasan antara pendidikan di sekolah dan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

c. Struktur Kegiatan

Kegiatan PPK bisa sangat bervariasi tergantung dari apa yang menjadi prioritas pembentukan karakter dalam lembaga pendidikan. Kegiatan PPK mengajak masing-masing sekolah untuk menemukan “*branding*” khas mereka sehingga sekolah di

Indonesia menjadi sangat kaya sekaligus unik. Selain mendorong tiap sekolah untuk memiliki “branding” sendiri, struktur kegiatan dalam PPK diharapkan merupakan perwujudan dari 4 dimensi pengolahan karakter sebagaimana yang dikatakan Ki Hadjar Dewantara yaitu olah raga, olah pikir, olah rasa dan olah hati. Kegiatan-kegiatan yang mendukung terbentuknya “*branding*” sekolah itu antara lain: pilihan kegiatan olahraga, kegiatan berkelompok, dan kegiatan ekstrakurikuler (pramuka, baris berbaris, drumband, kegiatan UKS, dokter kecil, dll), kegiatan memanfaatkan perpustakaan (mengatur jadwal berkunjung, mengikuti lomba perpustakaan, dan pemberian penghargaan kepada siswa dan guru yang secara rutin hadir di perpustakaan), kegiatan memanfaatkan potensi lingkungan, seperti sanggar seni dan museum

G. Nasionalisme

Nasionalisme memiliki peranan yang sangat besar dalam perkembangan bangsa dan negara Indonesia sejak zaman pergerakan membangun paham nasionalisme sampai dengan masa kemerdekaan saat ini. Seperti dikemukakan Ernest Renan (F. Isjawa, 1991), juga dikutip oleh Deleny Yumarlia (2005), yang dikemukakan bahwa: “Nasionalisme merupakan rasa kesadaran yang kuat berlandaskan atas kesadaran akan pengorbanan yang pernah diderita bersama dalam sejarah dan atas kemauan menderita hal-hal itu dimasa depan”.

Ernest Renan (lkipj th) menyadari betapa pentingnya nilai sejarah dalam perkembangan paham nasionalisme, yang menekankan kepada perasaan senasib, persamaan pengalaman yang dapat membentuk suatu negara yaitu, nasionalisme adalah merupakan rasa kesadaran yang kuat yang berlandaskan atas kesadaran akan pengorbanan yang

pernah diderita bersama dalam sejarah dan atas kemauan menderita hal-hal serupa itu dimasa depan.

Semangat kebangsaan yang memang telah berhasil menyatukan semua elemen bangsa bersatu melawan para penjajah yang menguasai Indonesia ratusan tahun lamanya. Bangsa Indonesia adalah negara yang sangat majemuk dan beranekaragam baik itu kebudayaannya maupun masyarakatnya. Keanekaragaman itu tentu saja merupakan suatu pedoman dan faham yang cocok dengan karakter kemajemukan itu sendiri. Paham yang dirasakan cocok dengan kemajemukan ini adalah konsep kebangsaan yaitu nasionalisme. Semangat kebangsaan ini mutlak diperlukan untuk mengatasi kebhinnekaan agar menjadi ketunggalikaan. Nasionalisme juga merupakan suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi dari setiap warga suatu bangsa ditunjukkan kepada bangsa dan negara. Lebih lengkapnya Hans Khon (1984) memberikan arti nasionalisme sebagaimana yang diterjemahkan oleh Sumantri Mertadipuro dalam Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya (1984: 11) menerangkan sebagai berikut: Nasionalisme sebagai suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Perasaan sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada disepanjang sejarah dan kekuatan-kekuatan yang berbeda-beda. Hal senada dengan pendapat di atas Soekarno (1965:3), mengemukakan bahwa “nasionalisme adalah suatu tekad, suatu keinsyafan rakyat bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu bangsa”.

Dengan demikian, nasionalisme atau rasa nasionalis membentuk rasa percaya diri dan merupakan esensi mutlak jika kita mempertahankan diri dalam perjuangan melawan kondisi-kondisi yang menyakitkan. Dikatakan juga bahwa

nasionalisme menunjukkan adanya keyakinan dan kesadaran rakyat bahwa mereka merupakan satu golongan dan satu bangsa. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nasionalisme berawal dari kesamaan sejarah, dimana di dalamnya terdapat rakyat yang memiliki tekad untuk bersatu sebagai satu bangsa yang utuh, tanpa mebeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan, dan memiliki sebuah ikatan yang amat kuat dan tidak mudah lepas apabila ada pihak lain yang ingin melepaskan ikatan itu.

Syarat yang sudah berlaku di masa sekarang bahwasannya setiap bangsa harus membentuk suatu Negara, dan bahwa Negara itu harus meliputi seluruh bangsa. Mulanya kesetiaan atau paham kebangsaan orang tidak ditujukan kepada Negara kebangsaan, melainkan kepada berbagai macam bentuk kekuasaan organisasi politik, kekuasaan sosial, raja atau golongan keagamaan, tetapi lama kelamaan paham nasionalisme berkembang menjadi diakui oleh umum. Hampir sama seperti yang dikemukakan oleh Nugroho Notosusanto (1979:53), tentang nasionalisme dengan mengutip dari George Mc. T. Kahin (lkipi th) mengatakan sebagai berikut: "Nasionalisme adalah suatu ide yang mengisi hati manusia dengan suatu pikiran baru dan mendorong untuk menterjemahkan dalam tindakan berupa aksi yang diorganisasi. Oleh karena itu, nasionalisme bukan semata-mata suatu kelompok yang diikat dan dijiwai oleh kesadaran bersama, melainkan juga merupakan suatu kelompok yang ingin mengungkapkan dirinya kedalam apa yang dianggapnya bentuk tertinggi dari pada kegiatan yang terorganisasi yakni negara yang berdaulat". Nugroho Notosusanto memberikan tekanan bahwa nasionalisme merupakan spirit, semangat, moril, yang hidup pada diri manusia demi keagungan bangsa.

H. Karakteristik Nasionalisme Indonesia

Sartono Kartodirdjo (1992) mengemukakan unsur-unsur nasionalisme di Indonesia dibagi dalam tiga kategori:

1. Unsur kognitif menunjukkan adanya pengetahuan atau pengertian akan suatu situasi/fenomena tertentu dalam hal ini mengenai pengetahuan akan situasi kolonial pada segala parposinya.
2. Unsur orientasi nilai/tujuan menunjukkan keadaan yang dianggap berharga oleh pelaku-pelakunya, dalam hal ini dianggap sebagai tujuan atau hal yang berharga adalah memperoleh hidup yang bebas dari kolonialisme
3. Unsur afektif dari tindakan kelompok menunjukkan situasi dengan pengaruhnya yang menyenangkan atau menyusahkan bagi pelaku-pelakunya. Berbagai macam diskriminasi pada masyarakat kolonial melahirkan aspek afektif. Melihat pendapat di atas, maka ketiga aspek tersebut di atas tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena saling berhubungan antara aspek satu dengan aspek lainnya yang akan saling menunjang dalam satu kesatuan.

Substansi nasionalisme Indonesia mempunyai dua unsur: Pertama, kesadaran mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak suku, etnik dan agama. Kedua, kesadaran bersama bangsa Indonesia dalam menghapuskan segala bentuk penjajahan dan penindasan di Indonesia. Semangat dari dua substansi tersebutlah yang kemudian tercermin dalam proklamasi kemerdekaan dengan jelas dinyatakan “atas nama bangsa Indonesia”, sedangkan dalam pembukaan UUD 1945 dikatakan secara tegas, “segala bentuk penjajahan dan penindasan didunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Dilihat dari sejarahnya, menurut Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bahwa karakteristik nasionalisme Indonesia antara lain:

1. Persamaan asal keturunan bangsa (etnik), yaitu bangsa Indonesia berasal dari rumpun bangsa melayu yang merupakan bagian dari ras mongoloid dan kemudian diperkaya oleh variasi percampuran darah antar ras.
2. Persamaan pola kebudayaan, terutama cara hidup sebagian suku-suku petani dan pelaut dengan segala adat istiadat dan lembaga sosialnya, manifestasi (perwujudan) persamaan bahasa nasional, yaitu bahasa indonesia.
3. Persamaan tempat tinggal yang disebut dengan nama khas tanah air, yakni tanah tumpah darah seluruh bangsa berwilayah dari sabang sampai merauke.
4. Persamaan senasib kesejahteraanya, baik kejayaan bersama dimasa kejayan kerajaan-kerajaan besar jaman bahari sriwijaya dan majapahit, maupun penderitaan bersama dibawah dominasi penjajah asing. e) Persamaan cita-cita yakni persamaan cita-cita hidup bersama sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat serta mmembangun negara dalam ikatan persatuan indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. (Risalah Sidang BPUPKIPPKI, 1995)

Adapun karakteristik Nasionalisme Indonesia pada masa sekarang sebagaimana tercantum dalam Pancasila sila ke tiga, yaitu Persatuan Indonesia dalam Pendidikan Kewarganegaraan SMA dengan berlandaskan pada sila ketiga pancasila, maka bangsa Indonesia memiliki ciri atau karakteristik nasionalisme yang terdiri dari butir Pancasila, sila ketiga yakni sebagai berikut:

1. Menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan

2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan
3. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia
4. Mengembangkan rasa kebanggaan dan kebangsaan dan bertanah air Indonesia
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Nasionalisme merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila ketiga karena nasionalisme ini mewujudkan perwujudan dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bahwasannya paham kebangsaan atau nasionalisme pada dasarnya mempunyai pokok-pokok yaitu kesetiaan terhadap negara dalam segala aspeknya, perasaan senasib dan sepenanggungan, sebagai identitas negara, merupakan suatu paham, dan pengakuan adanya negara nasional.

Dengan demikian, dapat diidentifikasi bahwa ciri atau indikator-indikator sikap dan perilaku yang mencerminkan nasionalisme adalah sebagai berikut:

1. Bangga menjadi bangsa dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia
2. Mengakui dan menghargai sepenuhnya keaneka ragaman pada diri bangsa Indonesia
3. Bersedia mempertahankan dan memajukan negara serta nama baik bangsa

4. Senantiasa membangun rasa persaudaraan, solidaritas dan kedamaian antar kelompok masyarakat dengan semangat persatuan
5. Menyadari sepenuhnya sebagai bagian dari bangsa lain untuk menciptakan hubungan kerja sama saling menguntungkan
6. Memiliki rasa cinta tanah air Indonesia
7. Menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri dan golongan atau kelompok

I. Toleransi Kehidupan Beragama

Keragaman beragama dalam segala segi kehidupan merupakan realitas yang tidak mungkin untuk dihindari. Keragaman tersebut menyimpan potensi yang dapat memperkaya warna hidup. Setiap pihak, baik individu maupun komunitas dapat menunjukkan eksistensi dirinya dalam interaksi sosial yang harmonis. Namun, dalam keragaman tersimpan juga potensi destruktif yang meresahkan yang dapat menghilangkan kekayaan khazanah kehidupan yang sarat keragaman. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan agar potensi destruktif ini tidak meledak dan berkelanjutan. Salah satu cara yang banyak dilakukan adalah memperkokoh nilai toleransi beragama.

Pada masyarakat yang multiagama, Harold Howard (Saefullah dalam Suryana, 2011) mengatakan bahwa ada tiga prinsip umum dalam merespon keaneka ragaman agama. Pertama, logika bersama, Yang satu yang berwujud banyak. Kedua, agama sebagai alat, karenanya wahyu dan doktrin dari agama-agama adalah jalan atau dalam tradisi Islam disebut syariat untuk menuju Yang Satu. Ketiga, pengenalan kriteria yang mengabsahkan, maksudnya mengenakan kriteria sendiri pada agama-agama lain.

Toleransi kehidupan beragama di masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan mengingat ada enam agama yang diakui resmi oleh Pemerintah, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hwuchu. Menurut Suryana (2011: 133) bahwa kerukunan beragama tidak berarti merelatifkan agama-agama yang ada dengan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai unsur dari agama totalitas tersebut. Urgensi dari kerukunan adalah mewujudkan kesatuan pandangan dan sikap guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan serta tanggung jawab bersama sehingga tidak ada pihak yang melepaskan diri dari tanggung jawab atau menyalahkan pihak lain. Kerukunan beragama berkaitan dengan toleransi, yakni istilah dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya toleransi beragama, yakni penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya.

Dalam pengertian yang luas toleransi lebih terarah pada pemberian tempat yang luas bagi keberagaman dan perbedaan yang ada pada individu atau kelompok-kelompok lain. Oleh sebab itu, perlu ditekankan bahwa tidak benar bilamana toleransi dimaknai sebagai pengembirian hak-hak individu atau kelompok tertentu untuk disesuaikan dengan kondisi atau keadaan orang atau kelompok lain, atau sebaliknya mengorbankan hak-hak orang lain untuk dialihkan sesuai dengan keadaan atau kondisi kelompok tertentu. Toleransi justru sangat menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing individu atau kelompok tersebut, namun di dalamnya diikat dan disatukan dalam kerangka kebersamaan untuk kepentingan yang sama. Toleransi

adalah penghormatan, penerimaan dan penghargaan tentang keragaman yang kaya akan kebudayaan dunia kita, bentuk ekspresi kita dan tata cara sebagai manusia. Hal itu dipelihara oleh pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, dan kebebasan pemikiran, kata hati dan kepercayaan. Toleransi adalah harmoni dalam perbedaan (*UNESCO APNIEVE*, dalam Endang, 2013: 92)

J. Tindakan Intoleransi dalam Kehidupan Beragama

Tindakan intoleransi dalam kehidupan beragama sering menimbulkan teror di masyarakat. Terorisme secara klasik diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut dalam masyarakat (Hakim, 2004). Dengan beralih pada agama seseorang atau sekelompok orang melakukan kekerasan terhadap orang lain sehingga orang lain atau kelompok merasa takut atau terancam hidupnya. Tindakan intoleransi sering mengarah pada radikalisme. Alwi, et. al., (2002: 919) mengartikan radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Paham ini menganggap apa yang diyakini sebagai suatu kebenaran yang harus disebarluaskan kepada masyarakat agar terjadi perubahan dalam masyarakat sesuai dengan keyakinan yang dianut. Cara yang dilakukan dengan memaksakan kehendak kepada orang lain atau menimbulkan kekerasan dan teror menimbulkan konflik sosial.

K. Hasil-Hasil Penelitian Radikalisme

No	Kondisi: Praktek Baik/ Segi Positif dan Penyimpangan	Penyebab/Permasalahan
A	<p>SETARA <i>Institute for Democracy and Peace</i> (SIDP) :Laporan Survey Toleransi Siswa SMA Negeri di Jakarta & Bandung Raya, 2016 dan 2015.</p> <p>Penyimpangan temuan 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5,8% siswa mendukung mengganti Pancasila sebagai dasar Negara (hal 21) 3,9% siswa menganggap kelompok lain kafir dan sesat 6,8% siswa menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan keyakinan 4,6% siswa melarang pendidikan rumah ibadah 30,8%siswa setuju Ketua Kelas/OSIS harus satu agama (hal 22) 38,0% memilih Bupati/Walikota/Gubernur yang satu seagama 11,3% siswa menganggap Khilafah merupakan sistem pemerintahan yang paling baik untuk diterapkan di Indonesia saat ini (hal 24) 5 responden (0.7%) setuju dengan gerakan ISIS <p>Penyimpangan Temuan 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> 8,5% (58 responden) menyatakan setuju jika Pancasila sebagai dasar 711item diganti dengan agama tertentu 7,2% responden yang setuju dengan gerakan ISIS 31,8% responden menyatakan materi pelajaran agama tidak mendukung pemahaman kebhinekaan 	<p>Penyebab:</p> <p>Pola penanaman ide-ide intoleransi melalui guru, kurikulum, dan perjumpaan dengan alumni melalui sistem mentoring keagamaan dengan membimbing pelajar mengaji, disertai dialog-dialog bertema keagamaan. Mentoring digelar atas alasan kurangnya jam pelajaran agama yang hanya dua jam dalam seminggu. Dari kegiatan itulah penyebaran 711itemat tertentu dimulai. (hal 2)</p> <p>Guru PKn tidak mampu menjadikan PKn sebagai sarana efektif memperkuat toleransi.</p> <p>Buku-buku pelajaran juga ditengarai menyebarkan paham intoleransi.Buku pelajaran SMA di Bandung, salah satu babnya menampilkan materi</p>

No	Kondisi: Praktek Baik/ Segi Positif dan Penyimpangan	Penyebab/Permasalahan
B	<p>Survei Wahid Foundation: "Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial Keagamaan di Kalangan Muslim Indonesia", 2016.</p> <p>Penyimpangan: Responden adalah umat Islam berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah, menemukan: 59,9 % memiliki kelompok yang dibenci, yakni mereka yang berlatar belakang agama non muslim, kelompok tionghoa, komunis, dan selainnya. Dari jumlah 59,9 persen itu, sebanyak 92,2 persen tak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia. 7,7 % bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan sebanyak 0,4 persen justru pernah melakukan tindakan radikal. Praktik baik/ Positif: Segi positif: 82,3 persen menyatakan dukungannya kepada Pancasila dan UUD 1945.</p>	<p>"kebangkitan prajurit Islam". Salah satu kutipan kalimat di buku itu misalnya, "semua orang yang menyembah Tuhan selain Allah adalah kafir dan pantas dibunuh. (Arzita, 2016; penyebab: hasil studi tahun 2015).</p>
C	<p>Maarif Institute, 2017. Penelitian Penguatan Institusi Sekolah Melalui</p>	

No	<p>Kondisi: Praktek Baik/ Segi Positif dan Penyimpangan</p>	<p>Penyebab/Permasalahan</p>
	<p>Kebijakan Internal Sekolah yang Mengokohkan Kebinekaan: Kota Banda Aceh, Kabupaten Lebak, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Mataram, dan Kota Makassar.</p>	
	<p>Temuan: Produk kebijakan di tingkat pusat maupun daerah dan sekolah, tidak ada yang secara spesifik berkaitan dengan penguatan atau pelemahan kebinekaan. Kendati demikian, terdapat anasir-anasir yang menguatkan/mempertemah Kebinekaan, termuat dalam: Peraturan/ kebijakan sekolah tentang (1) Pelatihan Pengembangan Ketakwaan dan Keimanan Melalui Pendidikan Dimiyah dan (2) Regulasi Tentang Pemisahan Kelas Laki-laki dan Perempuan di Sekolah Menengah di Kota Banda Aceh yang berasal dari Pemerintah Kota dan Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. (3) Wajib Belajar Baca Tulis Qur'an di Kab. Pandeglang yang berasal dari Pemkab. (4) Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Pemkab Cianjur) dan (5) Jabar Menghagal (Pemprov Jawa Barat). (6) Inbup tentang Gerakan Sholat Subuh Berjamaah di Mesjid dan (7) Perbup tentang Pengelolaan Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Berbasis Masyarakat serta (8) Perbup tentang 10 Kebiasaan Akhlak Mulia (Kab. Sukabumi), (9) Libur Fakultatif untuk Siswa Beragama Hindu (Kota Mataram), (10) Sekolah menerima siswa yang berasal dari suku, agama, ras dan budaya apapun kecuali SMAN 10 Kota Banda Aceh yang hanya menerima siswa muslim; (11) Pemberlakuan Imtaq di SMAN 1 Cibadak Kab. Sukabumi</p>	<p>Permasalahan: Terdapat Indikasi proses penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI di sekolah: Sekolah cenderung abai dengan motif dibalik aktivitas alumni, seperti penyebaran pemahaman keagamaan dan 73lternat yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI seperti ide pembentukan khilafah, serta menjadikan siswa sebagai basis dukungan bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan. Pola penetrasi di sekolah melalui pertemuan-pertemuan terbatas (liqa) dengan menggunakan modul, mentoring dan bahan-bahan bacaan berupa buku terjemahan dan 73lternat yang berisi pandangan anti-kebinekaan yang diterbitkan oleh</p>

No	<p>Kondisi: Praktek Baik/ Segi Positif dan Penyimpangan</p> <p>yang menyebabkan Upacara Bendera diselenggarakan dua minggu sekali; Selain itu, ditemukan Kebiasaan berupa: (1) Transmisi Pengetahuan melalui Pembelajaran; (2) SDM Guru yang Mengampu Mata Pelajaran PKn, Sejarah dan PAI; (3) Upacara Bendera; (4) Pelaksanaan Imtaq (Iman dan Taqwa); (5) Urutan Warga Sekolah Bagi Siswa Kurang Mampu dan Terkena Musibah; (6) Beasiswa Bagi Siswa yang Kurang Mampu; (7) Beasiswa Bagi Siswa yang Berprestasi Secara Akademik dan Non-Akademik Tanpa Memandang SARA; (8) Akses terhadap Fasilitas Tempat Ibadah kendati Belum Merata; (9) Akses terhadap Pembina (Pemateri) Keagamaan kendati Belum Merata; (10) Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Keagamaan; (11) Dukungan Kegiatan Ekstrakurikuler Berbasis Keagamaan; (12) Pengaturan Seragam Sekolah; (13) Peran OSIS dan Organisasi Ekstrakurikuler. Kesepakatan Bersama berupa Pendaftaran Siswa Aliran Kepercayaan menjadi Islam untuk keperluan database sekolah karena tidak tersedia kolom Sunda Wiwitan.</p>	<p>Penyebab/Permasalahan</p> <p>pihak tertentu.</p> <p>Pola lain adalah penetrasi ideologis oleh organisasi massa bertaraf transnasional yang memainkan peran yang cukup signifikan bagi proses yang terjadi di sekolah; antara lain: melakukan mentoring dan pendampingan kegiatan ekstrakurikuler serta penetrasi terhadap para tenaga pengajar sekolah.</p> <p>Pola tersebut menjadi lazim dilakukan sebagai upaya memperkuat penetrasi ideologis yang pada dasarnya bertentangan dan cenderung meruntuhkan sendi-sendi kebangsaan yang didasarkan pada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
D	<p>Puslitjak Dikbud (2016): Kajian Pendidikan Kebhinekaan Pada Satuan Pendidikan Menengah</p>	

No	<p>Kondisi: Praktek Baik/ Segi Positif dan Penyimpangan</p> <p>Penyimpangan: 8,2 % siswa setuju-sangat setuju Ketua OSIS dari agama yang sama 6,8% siswa merasa mengganggu sebaiknya Ketua OSIS dari Etnis yang sama. Praktik baik Pendidikan Kebhinekaan: Kebijakan Sekolah Pembauran antar siswa yang bhineka Memberikan ruang/wadah aktualisasi budaya-agama Pembiasaan penumbuhan budipekerti Program afirmasi lintas etnis Peran Guru Pembelajaran menarik Pemahaman kebangsaan dan aktualisasi</p>	<p>Penyebab/Permasalahan</p> <p>Permasalahan/ Kendala Penerapan pendidikan kebhinekaan: Sikap warga sekolah: masih kuat primordial keluarga, pemahaman agama sempit (eksklusif), sulit memantau kegiatan siswa di luar Kebijakan sekolah: Kemampuan kognitif masih prioritas dan Keterbatasan sumberdaya</p>
E	<p>Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP, 2011): Hasil Survei LaKIP tentang kekerasan bermerek agama di kalangan pelajar</p> <p>Penyimpangan: Paham (Ideologi) Radikalis: 12.1 % siswa setuju organisasi radikal</p>	
		<p>Penyebab kekerasan berlabel agama marak adalah kurikulum dan guru agama PAI.Ideologi terorisme</p>

No	Kondisi: Praktek Baik/ Segi Positif dan Penyimpangan	Penyebab/Permasalahan
	<p>23,6 % guru PAI setuju organisasi radikal</p> <p>25% siswa menyatakan Pancasila tidak relevan</p> <p>21% guru PAI menyatakan Pancasila tidak relevan</p> <p>Tindakan:</p> <p>52,3 % siswa setuju pengrusakan dan pengegelan rumah ibadah bermasalah.</p> <p>40,9 % guru PAI setuju pengrusakan dan pengegelan rumah ibadah yang bermasalah</p>	<p>berhasil menyusup masuk melalui mata pelajaran PAI dan guru-guru agama PAI.</p>
F	<p>Wahid Foundation 2016: Laporan Riset Potensi Radikalisme di Kalangan Aktivist Rohani Islam Sekolah-Sekolah Negeri</p>	
	<p>33% responden mengartikan jihad sebagai berperang dan mengangkut senjata melawan orang kafir.</p> <p>78% responden mendukung ide kekhilafahan</p> <p>17% responden setuju bahwa orang murtad dibunuh.</p> <p>10% responden mendukung bom Sarinah</p> <p>6% responden mendukung ISIS</p>	
G	<p>Saiful Mujani Research Consulting (SRMC) pada Desember 2015 dan 2007, menemukan:</p>	

No	Kondisi: Praktek Baik/ Segi Positif dan Penyimpangan	Penyebab/Permasalahan
	<p>1. 4% warga berusia 22-25 tahun dan 5% warga yang masih sekolah/kuliah yang mengenal ISIS menyatakan setuju dengan apa yang diperjuangkan ISIS (2015).</p> <p>2. Mayoritas muslim menolak ISIS. Penolakan tersebar merata di semua di kategori jender, desa-kota, umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, wilayah, etnis, dan agama. Di semua kelompok itu, yang menyatakan ISIS boieh didirikan di Indonesia, pada umumnya hanya sekitar 0-2% (2015).</p> <p>3. 9,3% setuju Negara diganti dengan Negara Islam atau khilafah (2017).</p> <p>4. Dari 66,4% yang tahu ISIS, 2,7% setuju/sangat setuju perjuangan ISIS (2017)</p>	
H	Pustitjak Dikbud (2017): Kajian Radikalisme di Kalangan Pelajar: Studi Cepat (Awal) di Kabupaten Cilacap	
	<p>Berdasarkan keterangan informan (Ketua FKUB Cicacap): di beberapa SMA dan SMP Cilacap terdapat guru yang menyampaikan paham khiafah kepada para siswa 77Itema sikap penolakan terhadap dasar 77Item Pancasila.</p> <p>Ada empat guru di SMPN 2 Sidareja yang selalu tidak mau mengikuti upacara bendera, hormat bendera, membaca dan menyanyikan Pancasila Seluruhnya terdapat empat guru dan satu ketua komite yang berpandangan demikian. Mereka adalah Sudarti (guru PKn), Bashir (guru olahraga),</p>	<p>Beberapa guru di Cilacap “dekat” dengan organisasi yang mengusung gagasan khilafah, HTI (Keterangan kepolisian)</p> <p>Sampai saat ini tidak ada semacam pedoman yang dapat dijadikan dasar pihak kepolisian untuk melakukan pembinaan di sekolah (disampaikan</p>

No	<p>Kondisi: Praktek Baik/ Segi Positif dan Penyimpangan</p> <p>Suratno (guru bahasa Indonesia-saat ini sudah pensiun), Taufik (guru Matematika) dan Sukanto (Ketua Komite 2001-2014). Beberapa dari nama itu (Bashir, Suratno, dan Sukanto) bahkan telah masuk dalam catatan aparat penegak hukum karena mereka menjenguk Ust. Abu Bakar Baasyir di LP, Nusa Kambangan. Hal ini diketahui Pak Beni dari Danramil kecamatan Sidareja (Kasus 2013, sudah dilakukan pembinaan)</p> <p>Terdapat tiga guru di SMPNI sidareja yang berafiliasi dengan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia). Ketiganya adalah H. Sugiyanto (guru Bhs. Indonesia), Suyamto (guru Bahasa Indonesia), dan Jaswan (guru Matematika). Mereka yang tergabung dalam LDII ini menganggap umat islam lain sebagai kafir sehingga tidak mau beribadah bersama dengan orang di luar kelompok mereka.</p> <p>Terdapat seorang karyawan TU SMAN 1 Cilacap yang seringkali menyampaikan gagasan tentang khilafah saat menjadi Khatib shalat Jum'at di Sekolah. Tidak secara spesifik menentang dasar Negara Pancasila (penjelasan alumni SMAN 1 Cilacap)</p>	<p>Penyebab/Permasalahan</p> <p>oleh Kanit Bimbingan Masyarakat, Polsek Sidareja). Para guru jarang mendampingi siswa pada Jumat dan kegiatan Rois di sekolah</p>
----	--	---

L. Radikalisme dan Pelajar: Fenomena Di Beberapa Negara

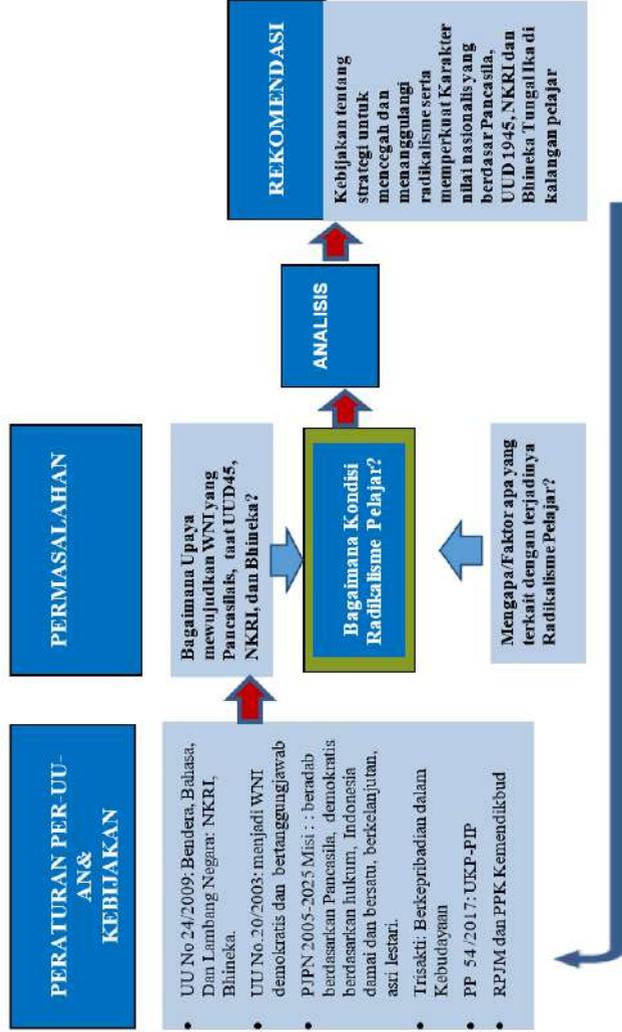
No	NEGARA	KONDISI	PENYEBAB	SOLUSI
1	<p>Australia</p> <ol style="list-style-type: none"> 200 warga Australia yang berniat melakukan perjalanan ke Timur Tengah termasuk Suriah mereka bergabung dengan ISIS, mereka telah dicegat polisi Australia (IRNA dalam Agus SB, 2016). Menteri Imigrasi Peter Dutton hari Rabu (25/3/2015) menjelaskan seorang remaja 17 tahun dicegat pada 12 Maret 2015 di terminal keberangkatan internasional karena akan bergabung dengan ISIS. (Agus SB, 2016:123) 	<ol style="list-style-type: none"> Menteri Imigrasi Australia menginformasikan bahwa banyak diantara para pemuda ini memutuskan untuk pergi ke Irak dan Suriah setelah mengakses jejaring sosial dan internet (IRIB Radio, 25 Maret 2015) (Agus SB, 2016:123). Anak muda ini tanpa sepengetahuan orang tua mereka mengunduh dan menerima beragam informasi media sosial dan rinternet. Kelompok memaikan ini (ISIS) berhasil menjangkau pikiran anak muda Australia melalui layar komputer, mencuci otak mereka dan ini menyulitkan negara-negara Barat saat ini (Radio Australia, 25 Maret 	<p>Rekomendasi Agus Surya Bakti, 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pentingnya Penguatan Regulasi Penanggulangan tindakan dan aksi terorisme harus pula menyentuh upaya penanggulangan dan pencegahan sejak pra-aksi. Dalam konteks pencegahan terorisme di dunia maya, aspek regulasi menjadi sangat penting untuk dikuatkan. Pemerintah harus segera memikirkan masivitas dan dampak yang timbul dari terorisme di dunia maya yang lambat laun telah mengotori ruang bermain dan sarana pengetahuan anak-anak muda kita melalui media internet. Sinergitas Negara dengan 	

No	NEGARA	KONDISI	PENYEBAB	SOLUSI
2	Amerika Serikat	FBI mencatat adanya kasus pelajar antara 13-18 tahun yang masuk dalam jaringan kelompok ekstrim.	Penyebaran paham radikal di kalangan pelajar diataranya terjadi melalui komunikasi online dengan kelompok-kelompok radikal.	<p>Masyarakat</p> <p>Peran seluruh komponen masyarakat dari unit paling kecil keluarga, tokoh agama, guru, dosen, insan media, dan lainnya merupakan mitra strategis yang sangat efektif dalam membendung pengaruh radikalisme di dunia maya.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membentuk Tim Penanganan Ancaman dan Prosedur intervensi untuk siswa yang diduga terpapar paham radikal. b. Pelatihan bagi guru dan karyawan sekolah c. Sekolah diwajibkan menjalin kerjasama dengan para pihak (praktisi kesehatan mental, aparat hukum, pelayanan sosial, dll) untuk mengankal penyebaran paham radikal.

No	NEGARA	KONDISI	PENYEBAB	SOLUSI
3	Myanmar	Fenomena anti-muslim oleh biksu-biksu Budha dalam gerakan 969. Gerakan ini didukung oleh sebagian aparat pemerintah.		Otoritas pemerintah membatasi akses etnis Rohingya untuk mendapatkan pendidikan di tingkat universitas dengan alasan untuk mencegah terjadinya kekerasan.
4	Kanada	<p>a. Guru-guru di sekolah Islam swasta menyebarkan ideologi muslim ekstrim kepada para siswa (Raheel Reza, 2013)</p> <p>b. Rekrutmen kelompok ekstrim juga terjadi di Universitas melalui aktivitas-aktivitas informal.</p>		
5	Bangladesh	<p>a. Lebih dari 50 kelompok ekstrim dan 10 partai politik berbasis agama memiliki organisasi sayap di tingkat pelajar.</p> <p>b. Perkembangan jumlah madrasah swasta tak berijim ditengarai menjadi salah satu jalur penyebaran paham radikal.</p>		Melalui telaah atas buku-buku teks yang digunakan di sekolah, Pemerintah cenderung menghindari tema-tema kontroversial termasuk diantara isu radikalisme ini.

No	NEGARA	KONDISI	PENYEBAB	SOLUSI
6	Korea Selatan	Seorang remaja Korea Selatan yang hilang di Turki menyatakan ingin bergabung dengan ISIS. Keinginan remaja berusia 18 tahun ini di lontarkan melalui akun Twitter atas nama Sunni Mujahideen miliknya. Remaja yang diidentifikasi dengan nama keluarga Kim ini diperkirakan telah menyeberang ke Suriah	Seorang polisi senior Chung Jae-II, di Seoul seperti yang dikutip Channel News Asia, Rabu (21/1) mengatakan bahwa Kim menuliskan serangkaian pesan di akun Twitter miliknya untuk meminta informasi mengenai cara bergabung dengan ISIS (Agus SB, 2016:124).	

M. Kerangka Analisis



Guna mewujudkan kesepakatan para pendiri bangsa untuk membangun bangsa dan Negara Indonesia berdasarkan serta berjiwa Pancasila, UUD 1945 dalam bingkai kebhinekaan dan naungan NKRI telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Kendati pemerintah telah berupaya untuk melaksanakan amanat tersebut, antara lain melalui penguatan pendidikan karakter, namun ditemukan gejala tumbuhnya paham dan tindakan radikalisme di lingkungan sekolah yang memprihatinkan.

Gejala tersebut perlu dikaji secara seksama, untuk memperoleh data/informasi yang memberikan jawaban permasalahan tentang 1) Bagaimana kondisi sebenarnya radikalisme pelajar saat ini?, 2)) Bagaimana Upaya sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan siswa (WNI) yang Pancasila, taat UUD45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, dan 3) Mengapa/Faktor apa yang terkait dengan terjadinya paham dan tindakan Radikalisme di kalangan Pelajar?

Data/Informasi tersebut dianalisis untuk memperoleh bahan rekomendasi Kebijakan tentang strategi guna mencegah dan menanggulangi paham serta tindakan radikalisme dan langkah memperkuat nilai Karakter religious dan nilai nasionalis yang berdasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di kalangan pelajar. Rekomendasi kebijakan ini sekaligus sebagai upaya meningkatkan perwujudan amanat peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam membangun bangsa dan Negara Indonesia berjiwa Pancasila, UUD 1945 dalam bingkai Bineka Tunggal Ika.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan

Studi tentang radikalisme dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dianalisis secara deskriptif tentang kondisi nyata yang ada dilapangan, potensi, masalah dengan dukungan data empiris.

B. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi dilakukan secara *purposive* di empat lokasi, yakni: di Kabupaten Cilacap, Kota Bogor (Jabar), dan Kota Yogyakarta (DIY) dan Kota Malang (Jatim).

Kabupaten Cilacap dipilih sebagai sasaran survey cepat/awal karena berdasarkan berita dalam Tribun jateng.com (4/4/2017) yang berjudul “Geger Pelajar di Sekolah-Sekolah Negeri di Cilacap Dicekoki paham radikalisme”. Diberitakan, ajaran radikalisme ingin mengganti Pancasila telah menyebar di 14 SMA Negeri Unggulan dan dua SMP di Kabupaten Cilacap.

Kotamadya Bogor dipilih karena termasuk kota/kabupaten dengan indeks toleransi yang paling rendah di Indonesia (SETARA Institute, 2016). Bahkan diinformasikan lewat media, telah terjadi acara pembaiatan di kalangan ratusan mahasiswa untuk paham tertentu yang ingin mendidikan Negara lain yang menyimpang dari kesepakatan nasional sebagai NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kotamadya Yogyakarta dipilih karena ditengarai menjadi salah satu pusat penyebaran paham radikalisme dan sebagai kota pelajar dari multi etnis. Kotamadya Malang merupa-

kan “kota pelajar” baru yang tidak masuk dalam kota intoleransi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Di Kabupaten Cilacap dilakukan studi cepat dalam waktu dua hari efektif. Ini dilakukan untuk segera menjawab pertanyaan pengambil kebijakan tentang: Apakah benar ajaran radikalisme yang ingin mengganti Pancasila telah menyebar di 14 SMA Negeri Unggulan dan dua SMP di Kabupaten Cilacap?

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan Ketua dan Sekretaris Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cilacap, Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap, Kepala Sekolah dan guru agama dan Pkn SMA, SMK dan SMP, beberapa alumni siswa Siswa SMK, dan personil Poisi Sektor (Polsek). Observasi dilakukan untuk melihat situasi sekolah, lingkungan sekitar sekolah, termasuk memantau kejadian di sekitar Polsek yang berpotensi terjadi konflik antar ormas yang berbeda paham.

Pengumpulan data di dua lokasi lainnya (Kota Yogyakarta dan Bogor) dilakukan dengan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT), wawancara dan kuesioner.

DKT di Kota Surakarta dan Kota Bogor dilaksanakan bersama tiga kelompok. Kelompok pertama terdiri dari unsur Dinas Pendidikan (2 orang), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) (2 orang), Kandep Agama (1 orang) dan pengawas sekolah (2 orang). Kelompok kedua terdiri dari kepala sekolah SMAN (4 orang). Sementara itu, kelompok ketiga terdiri dari guru/ pengurus MGMP Pkn (2 orang) dan guru/ pengurus MGMP Pendidikan Agama Islam (2 orang). Pada masing-masing kelompok, diskusi berupaya memperdalam informasi mengenai kondisi

penyebaran paham radikal di wilayah kerja masing-masing, penyebab-penyebab atas kondisi tersebut, serta upaya-upaya yang telah maupun dapat dilakukan (kebijakan, program, dll) untuk mencegah dan mengatasi penyebaran paham radikal di lingkungan sekolah.

Rincian jumlah peserta diskusi kelompok terpumpun (DKT) di setiap kab/kota sampel sebagai berikut berikut:

Tabel 3.1 Jenis dan Jumlah Peserta DKT per Kab/Kota (selain Kabupaten Cilacap)

No	Peserta DKT	Jumlah(Orang)
1	Dinas Pendidikan Provinsi/ UPT Balai Dikmen Setempat	2
2	Ketua FKUB Kab/Kota	2
3	Kandepag Kab/Kota	1
4	Pengawas Sekolah SMA	2
5	Kepala Sekolah SMAN	4
6	Komite sekolah SMAN	2
7	Guru Ketua/Pengurus MGMP PKn SMA Kab/Kota	2
8	Guru Ketua/Pengurus MGMP Agama Islam SMA Kab/Kota SMA	2
TOTAL		17

Kuesioner digunakan untuk menjangkau informasi dari siswa mengenai: 1) ideologi dan dasar negara yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI; 2) gagasan/ paham dan tindakan “radikal” yang bertentangan dengan ideology dan dasar tersebut, dan, 3) alasan mengapa memiliki paham dan tindakan tersebut.

Penyebaran kuesioner untuk siswa dan guru dilakukan secara *online* dengan bantuan aplikasi *survey monkey*. Pengantar tentang tujuan survey dan daftar pertanyaan diinput dalam aplikasi *survey monkey* yang terkoneksi dengan siswa pemilik HP. Oleh sebab itu, sasaran siswa yang terlibat dalam *survey monkey* ini adalah siswa sekolah-sekolah yang mengikuti DKT, yakni 4 (empat) SMA di setiap Kabupaten/Kota sampel. Di setiap SMA masing-masing ditentukan 40 siswa yang dipilih secara acak, sehingga setiap kota/kab terdapat minimal 160 siswa sampel. Pengisian kuesioner siswa dibimbing langsung oleh petugas/peneliti dari Puslitjak Dikbud. Tujuannya agar pengisian kuesioner dilakukan secara benar dan menjamin waktu dan proses penyelesaian pengisian kuesioner secara tepat.

Untuk memperdalam data, akan dilakukan pula wawancara kepada beberapa siswa. Wawancara terutama dilakukan kepada siswa yang (berdasar hasil kuesioner) terpapar paham radikal. Melalui wawancara diharapkan diperoleh informasi lebih mendalam mengenai sejauh mana siswa terpapar paham radikal maupun kanal-kanal penyebaran paham radikal di sekolah. Wawancara juga akan dilakukan kepada beberapa alumni untuk menggali informasi mengenai penyebaran paham radikal di sekolah.

D. Analisis

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif didukung dengan data kuantitatif yang diarahkan untuk menjawab tujuan penelitian dan memperoleh bahan untuk menyusun rekomendasi kebijakan tentang strategi untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme serta memperkuat Karakter nilai nasionalis yang berdasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di kalangan pelajar.

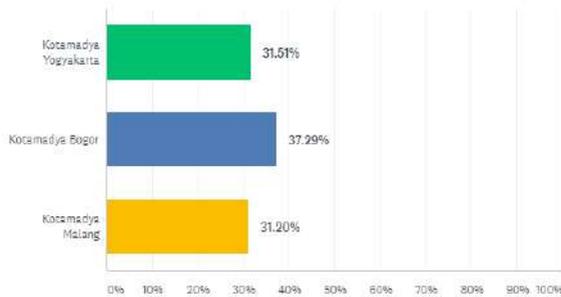
BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini diuraikan temuan hasil kajian yang mencakup temuan indikasi paham radikalisme dikalangan pelajar di Kabupaten Cilacap, Kota Bogor (Jabar), dan Kota Yogyakarta (DIY) dan Kota Malang (Jatim). Selanjutnya, memadukan dengan hasil temuan radikalisme dari studi terdahulu serta indikasi terjadinya radikalisme di negara lain. Uraian difokuskan untuk menjawab pertanyaan tentang: bagaimanakah kondisi radikalisme di sekolah, mengapa radikalisme terjadi di sekolah dan upaya pencegahan yang dilakukan berbagai pihak dalam mencegah radikalisme di sekolah. Kendati demikian, pada kasus di kabupaten Cilacap akan diuraikan tersendiri, mengingat tujuan awalnya ialah untuk memastikan di daerah tersebut telah terjadi “pencekooan” paham radikalisme.

A. Profil Responden

Hasil analisis kajian radikalisme dalam pendidikan ini didasarkan pada informasi dari 626 siswa dari 12 SMAN yang berhasil dikumpulkan melalui *survey monkey* di tiga kota, masing-masing 4 (empat) SMAN di kota Malang: 197 siswa, kota Bogor: 238 siswa dan kota Yogyakarta sebanyak 191 siswa. Informasi tentang kondisi radikalisme ini diperkuat dengan hasil Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dari tiga kota tersebut.

Answered: 641 Skipped: 5



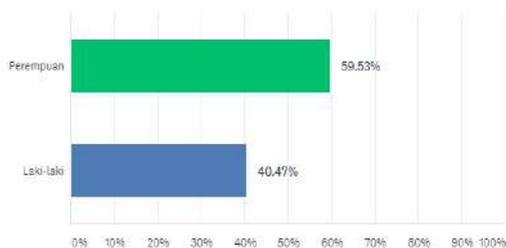
Grafik 4.1 Sebaran Responden di Tiga Kota Sampel

Dari hasil survei yang dilaksanakan pada tiga lokasi tersebut, dapat digambarkan profil responden secara agregat sebagai berikut:

1. Jenis kelamin

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada profil responden siswa, jenis kelamin perempuan lebih banyak (59,53%) dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki (40,47%). Hasil ini mengindikasikan bahwa responden siswa perempuan lebih mendominasi dalam proses survei yang dilakukan, walaupun jenis kelamin perempuan ini tidak ditentukan oleh tim peneliti.

Answered: 645 Skipped: 1



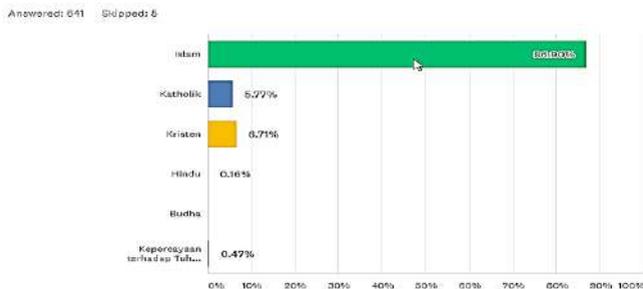
Grafik 4.2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari grafik terlihat bahwa jenis kelamin perempuan lebih banyak. Namun demikian, dominasi ini tidak terlalu timpang karena proporsi yang masih relatif berimbang. Jenis kelamin ini dianggap tidak mempengaruhi objektivitas penilaian dalam hasil analisis penelitian ini karena jenis kelamin bukanlah variabel yang dianggap mempengaruhi proses analisis.

2. Agama

Dari sisi ideologi, hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden beragama Islam. Aspek agama ini penting dianalisis, mengingat beberapa hasil survei yang dilakukan lembaga independen menemukan bahwa isu agama menjadi hal yang cukup mempengaruhi tumbuhnya paham radikalisme dan intoleransi di sekolah.

Grafik dibawah ini menggambarkan bahwa mayoritas responden siswa beragama Islam.

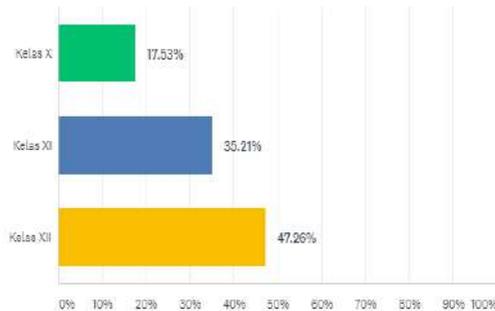


Grafik 4.3 Profil Responden Berdasarkan Agama

3. Kelas

Rata-rata responden siswa merupakan siswa yang menduduki kelas atas (XII). Pemilihan responden kelas atas terbanyak dianggap bahwa siswa telah memiliki pemikiran dan daya nalar yang cukup baik. Selain itu, siswa pada tingkat akhir cenderung lebih matang dan dianggap sudah siap memilih dan menentukan langkah hidup, apakah bekerja atau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Answered: 639 Skipped: 7



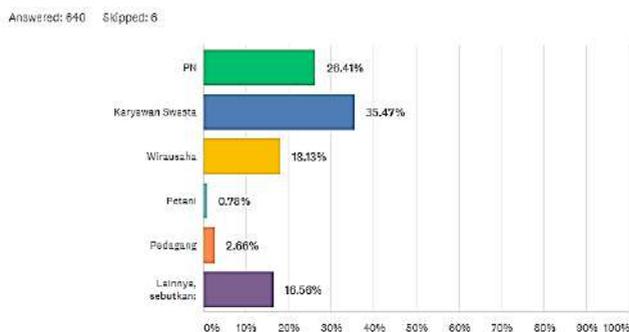
Grafik 4.4 Profil Responden Berdasarkan Kelas

4. Status Sosial Orang Tua

Dari hasil survei dan DKT yang dilakukan, status sosial dan pendapatan orang tua yang baik bukan merupakan jaminan siswa terlepas dari gerakan radikalisme dan intoleransi disekolah. Sama halnya dengan temuan Wahid Foundation, bahwa pendapatan ekonomi yang baik, maupun wilayah tempat tinggal siswa, tidak bisa jadi jaminan mereka terlepas dari gerakan radikalisme dan intoleransi. Dengan tingginya status ekonomi orang

tua, cenderung anak-anak mereka lebih gampang terpengaruh pada paham radikalisme dan intoleransi, karena mereka lebih mudah mendapatkan informasi-informasi mengenai ajaran-ajaran garis keras dari internet.

Hasil analisis studi menunjukkan bahwa pekerjaan orang tua siswa selain karyawan swasta yang mendominasi, juga status pegawai negeri (PNS) cukup banyak.



Grafik 4.5 Profil Responden Berdasarkan Status Sosial Orang Tua

B. Kondisi Radikalisme di Sekolah

Tampaknya telah terdapat indikasi bahwa paham radikalisme telah masuk di lingkungan sekolah dengan beberapa tindakan seperti tidak ingin, atau bahkan menentang dan mengganti dasar ideologi dan dasar Negara Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika-intoleransi dan mengarah mengarah pada paham radikalisme. Kendati persentasenya rendah, indikasi yang mengarah pada paham radikalisme tersebut perlu diwaspadai dan diantisipasi.

1. Temuan Cilacap

Hasil studi cepat di Cilacap dilakukan dalam waktu dua hari efektif untuk segera menjawab pertanyaan pengambil kebijakan tentang: Apakah benar ajaran radikalisme yang ingin mengganti Pancasila telah menyebar di 14 SMA Negeri Unggulan dan dua SMP di Kabupaten Cilacap? Berdasarkan hasil telaah cepat di Cilacap tersebut, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada beberapa SMA dan SMP Cilacap **terdapat guru yang menyampaikan paham khilafah kepada para siswa** dan sikap penolakan terhadap dasar negara Pancasila, menjadi inspektur upacara dan hormat bendera **(Berdasarkan keterangan informan Ketua FKUB Cilacap)**
- b. Diketahui pernah ada empat guru di salah satu SMPN yang **tidak mau mengikuti upacara bendera, hormat bendera, membaca dan menyanyikan Pancasila**. Seluruhnya terdapat empat guru dan satu ketua komite yang berpandangan demikian.
- c. Terdapat tiga guru (Bhs. Indonesia, Bahasa Indonesia, Matematika) di salah satu SMPN yang berafiliasi dengan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia). Mereka menganggap **umat islam lain sebagai kafir** sehingga tidak mau beribadah bersama dengan orang di luar kelompok mereka.
- d. Terdapat seorang karyawan TU di salah satu SMAN yang seringkali menyampaikan **gagasan tentang khilafah** saat menjadi Khatib shalat Jum'at di

Sekolah. Tidak secara spesifik menentang dasar Negara Pancasila.

- e. **Tidak ditemukan indikasi siswa menolak** upacara bendera, hormat bendera, membaca dan menyanyikan Pancasila karena berbeda paham (keterangan alumni dan sekolah)

Kendati demikian, perlu diwaspadai karena ada sementara guru yang diketahui berafiliasi pada ormas yang dianggap radikal dan pernah menolak upacara bendera/Pancasila dan diduga berusaha mengajarkan pahamnya di lingkungan sekolah. Hasil studi cepat di Cilacap ini secara lengkap disajikan pada lampiran dalam laporan ini.

2. Temuan di Kota Malang, Bogor, dan Yogyakarta

Kajian ini menggunakan beberapa pertanyaan kepada para siswa untuk melihat respon siswa atas sebuah peristiwa dalam kehidupan keseharian mereka. Pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan sebagai indikator *proxy* guna melihat keterpaparan para siswa terhadap paham radikal. Secara umum dapat dikatakan kondisi di ketiga kota yakni Yogyakarta, Kota Malang dan Kota Bogor sangat baik. Artinya, tingkat keterpaparan siswa terhadap paham radikal sangat rendah. Sebagian besar siswa di tiga kota tersebut tidak memiliki paham dan melakukan tindakan yang mengarah pada radikalisme. Namun demikian, survei ini juga menghasilkan beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian antara lain beberapa siswa memandang bahwa Pancasila tidak sesuai dengan ajaran agama, UUD 1945 tidak perlu ditaati, hormat bendera tidak sesuai dengan ajaran agama, siswa setuju/sangat setuju individu dan ormas boleh memperjuangkan keyakinan dengan kekerasan. Dalam kaitan dengan

toleransi ada sementara siswa yang memiliki kecenderungan untuk menolong dengan preferensi terhadap agama tertentu, seperti diuraikan sebagai berikut.

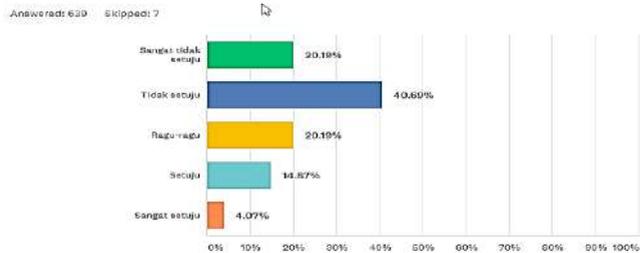
3. Pemahaman Terhadap Pancasila

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik ketika negara Indonesia didirikan dan hingga sekarang di era globalisasi, Negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara tentulah Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi tantangan global dunia yang terus berkembang.

Di era globalisasi ini peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia, karena dengan adanya globalisasi batasan-batasan diantara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia, jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi. Tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia. Tapi jika kita tidak dapat memfilter dengan baik sehingga hal-hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Dari faktor-faktor tersebutlah dibutuhkan peranan Pancasila sebagai dasar dan pedoman negara dalam menghadapi tantangan global yang terus meningkat di era globalisasi.

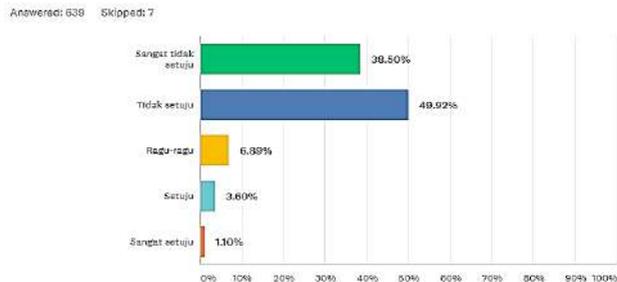
Namun demikian, survei ini menemukan bahwa terdapat 18,9 persen responden yang menyatakan bahwa

Pancasila sebagai dasar negara perlu diperbaharui untuk menjawab tuntutan zaman.



Grafik 4.6 Pemahaman Responden Terhadap Pancasila sesuai dengan Perkembangan Zaman

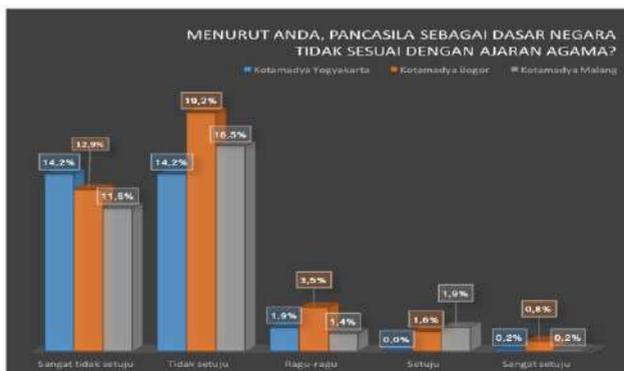
Hasil lain yang menjadi perhatian dalam survei ini adalah adanya 4,7 persen responden yang berpendapat bahwa Pancasila sudah tidak sesuai dengan ajaran agama.



Grafik 4.7 Pemahaman Responden Terhadap Pancasila Tidak Sesuai dengan Agama (Agregat)

Dari hasil DKT dengan kepala sekolah dan guru PKn, diketahui bahwa alasan siswa menyatakan demikian adalah didasarkan pada siswa yang beragama

berpikiran bahwa Pancasila bukan berasal dari Tuhan dan ayat-ayat suci, tetapi Pancasila merupakan buatan manusia yang sifatnya bisa diubah. Dari ketiga kota yang disurvei, secara parsial, siswa di kota Malang memberikan pendapat setuju yang terbanyak tentang Pancasila tidak sesuai dengan ajaran agama.



Grafik 4.8 Pemahaman Responden Terhadap Pancasila Tidak Sesuai dengan Agama (parsial)

Faktor pergaulan atau komunitas sangat berdampak pada pemahaman siswa sehingga ada yang memahami doktrin bahwa Pancasila itu salah dan yang benar adalah khilafah. Kendati persentasenya kecil, namun perlu diwaspadai oleh karena pandangan ini dikemukakan oleh siswa di tiga kota, yakni kota Malang, Bogor dan kota Yogyakarta dengan proporsi yang hampir sama, sehingga jika tidak dilakukan upaya pembinaan tertentu bisa menyebar pada siswa yang lainnya. Permasalahannya, kepala sekolah dan guru sulit mendeteksi dan mengetahui siswa yang memiliki pandangan tersebut karena umumnya mereka seperti siswa yang lain tidak tampak ada tindakan siswa yang

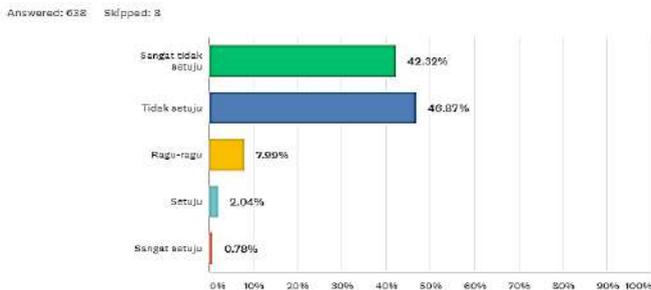
menolak mengucapkan teks pancasila, misalnya, atau menentang prinsip dasar Negara pada saat pembelajaran PPKn. Pihak sekolah di Bogor dan Yogyakarta bahkan meyakini tidak ada siswa yang menentang ideologi Pancasila.

Namun demikian, berdasarkan hasil DKT dengan kepala sekolah, mereka berpendapat bahwa pihak sekolah selalu berupaya untuk mencegah tindakan atau pemahaman yang dianggap mengarah ke radikal melalui pendekatan terhadap siswa serta mencaritemukan sumber pemahaman siswa tersebut.

Sebagaimana kita pahami, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki visi dan misi mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, melalui proses menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya; dan memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru; memahami dan menerapkan pengetahuan faktual dan konseptual tentang kewarganegaraan; dan menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual kewarganegaraan dengan terampil.

4. Pemahaman Terhadap UUD 1945

Dalam pertanyaan survei yang diajukan ke siswa mengenai pendapat siswa bahwa UUD 1945 tidak sesuai tuntunan agama sehingga tidak perlu ditaati, terdapat 2,82 persen responden siswa yang menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa UUD 1945 tidak sesuai dengan tuntutan agama sehingga tidak perlu ditaati.



Grafik 4.9 Pemahaman Responden Terhadap UUD 1945

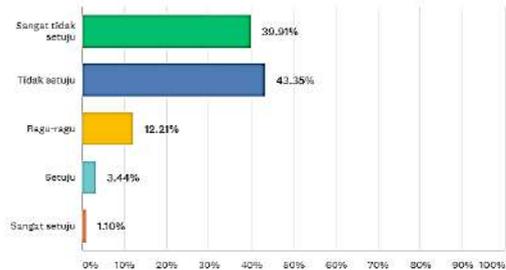
Hasil penelusuran melalui DKT, dikemukakan oleh guru PKn bahwa pendapat responden tersebut dikemukakan oleh siswa yang mendapat dan mengikuti ajaran-ajaran agama tertentu yang cukup fanatik, baik itu dari orang tua, masyarakat maupun yang diperoleh dari media-media internet. Seperti halnya dengan pendapat siswa terhadap Pancasila yang bukan merupakan buatan dari Tuhan, UUD 1945 pun mereka anggap hal sama. Mereka berpendapat bahwa yang perlu ditaati dalam hidup adalah kitab suci agama, karena kitab suci sebagai tuntunan hidup tidak seorang pun yang bisa merubah isinya. Sementara UUD 1945 bisa di *amandemen*, sehingga menurut mereka, isi UUD 1945 tersebut bukan tuntunan hidup dan tidak perlu ditaati.

5. Pemahaman Terhadap NKRI

Salah satu bentuk perwujudan tindakan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah menghormati simbol-simbol negara, antara lain penghormatan kepada bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia raya. Dalam kaitannya dengan pemahaman siswa terhadap penghormatan kepada bendera merah putih, hasil survei menemukan masih adanya pemahaman sebagian siswa yang sangat

setuju dan setuju (4,54%) bahwa pengormatan kepada bendera merah putih tidak sesuai dengan ajaran agama.

Answered: 639 Skipped: 7



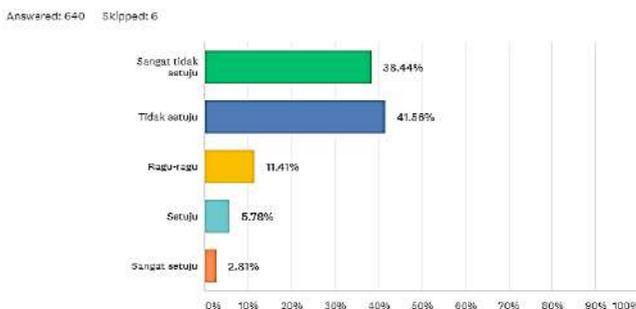
Grafik 4.10 Pemahaman Siswa terhadap Bendera Merah Putih

Dalam DKT terungkap bahwa pernyataan siswa tersebut berdasarkan pemahaman dan keyakinan mereka bahwa menghormati bendera merah putih adalah sama dengan menyekutukan Tuhan atau menyembah selain Tuhan sang pencipta. Mereka juga berpendapat bahwa dalam ajaran agama, yang patut dihormati itu adalah orang tua yang telah melahirkan mereka, bukan bendera.

Selain itu, banyak aliran-aliran tertentu yang berkembang dan bermacam-macam di Indonesia. Ada yang berusaha untuk mewujudkan Negara dengan Khilafah, Negara Islam. Agar terwujud itu semua maka aliran tersebut menentang sistem yang ada di Indonesia seperti demokrasi, pancasila, UUD 1945. Alasannya yang tidak setuju dengan demokrasi adalah karena demokrasi dari Barat bukan dari Islam maka sistem demokrasi tidak cocok jika diterapkan kepada orang Islam. Sehingga pemahaman tersebut juga menolak upacara bendera merah putih yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus karena dianggapnya menyakini atau menyembah bendera.

Sesungguhnya kurikulum yang dikembangkan dalam pelajaran sejarah maupun Pendidikan Kewarganegaraan, tersirat bahwa penghormatan kepada bendera merah putih itu adalah bertujuan untuk menghormati pejuang-pejuang yang telah membela bangsa Indonesia dengan bertumpahkan darah sampai-sampai dengan menaruhkan nyawanya demi memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Di Kabupaten Bogor, guru-guru PAI yang tergabung dalam forum MGMP PAI Kabupaten Bogor, melakukan strategi pembelajaran dengan memberikan contoh penghormatan kepada bendera melalui jalur cerita nabi yang juga sangat menghormati bendera. Itulah pentingnya untuk menghormati bendera merah putih bukan menyakini bendera merah putih.

Selain itu, hasil survei juga menemukan bahwa terdapat 8,59 persen siswa yang sangat setuju dan setuju bahwa mengheningkan cipta untuk memanjatkan doa bagi para arwah pejuang dan pahlawan bangsa bertentangan dengan ajaran agama.



Grafik 4.11 Pemahaman Siswa terhadap Mengheningkan Cipta untuk Para Pahlawan

Kesalahan yang menganggap bahwa menghormati bendera merah putih perlu untuk diluruskan karena

pemahaman seperti itu sangat membahayakan bagi keutuhan NKRI. Agama manapun yang diakui oleh Pemerintah Indonesia tidak pernah mengajarkan teorisme dan radikalisme, dan tidak ada agama satu pun yang menganjurkan untuk menjadi terorisme dan radikalisme.

Dalam DKT disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat dua hal yang perlu diberikan pemahaman kepada para siswa di sekolah. Pertama, terkait dengan konsep kebangsaan atau negara kebangsaan yang sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kedua, tentu tentang pengertian siswa tentang “syirik”, yang berarti perbuatan menyekutukan Tuhan, sehingga dapat dipahami bahwa menghormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bukanlah bagian dari pengertian syirik sebagaimana yang dimaksudkan dalam ajaran agama.

6. Pemahaman Terhadap Bhineka Tunggal Ika

Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu jua yang berasal dari buku atau kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular. Secara mendalam Bhineka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa dan lain-lain yang sama.

Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika juga terdapat pada lambang negara Republik Indonesia yaitu Burung Garuda Pancasila. Di kaki Burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat pula diartikan : Berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

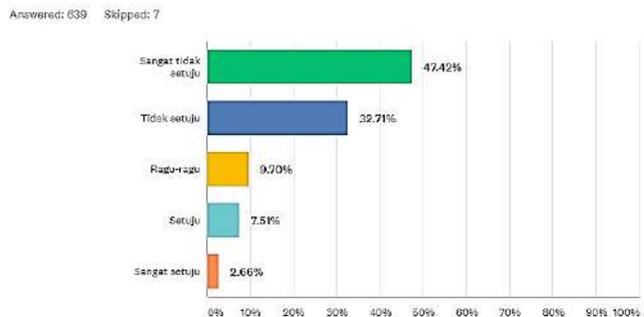
Sesungguhnya, makna kebhinekaan dalam pendidikan, terutama di sekolah diwujudkan dengan saling menghargai dan menghormati agama lain yang di akui oleh pemerintah.

Dalam kajian terori telah disebutkan bahwa keragaman beragama dalam segala segi kehidupan merupakan realitas yang tidak mungkin untuk dihindari. Keragaman tersebut menyimpan potensi yang dapat memperkaya warna hidup. Setiap pihak, baik individu maupun komunitas dapat menunjukkan eksistensi dirinya dalam interaksi sosial yang harmonis. Namun, dalam keragaman tersimpan juga potensi destruktif yang meresahkan yang dapat menghilangkan kekayaan khazanah kehidupan yang sarat keragaman. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan agar potensi destruktif ini tidak meledak dan berkelanjutan. Salah satu cara yang banyak dilakukan adalah memperkokoh nilai toleransi beragama. Salah satu contoh, di SMA 2 Yogyakarta dalam kegiatan hari raya Qurban, semua siswa baik muslim maupun non muslim terlibat dalam pembagian daging kurban. Perlakuan sama terhadap setiap pemeluk agama siswa penting dilakukan agar tidak ada kecenderungan berat sebelah.

Strategi lain misalnya di SMAN 1 Yogyakarta, sekolah ini memiliki semacam Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Dari laporan hasil riset Litbang SMA, kegiatan rohis di SMA 1 Yogyakarta bisa menjadi model kegiatan rohis di SMA yang lain. Riset ini memantau langsung kegiatan rohis baik yang bersifat massal maupun kelompok kecil dan kegiatan selama beberapa minggu melalui berbagai program dan referensi yang digunakan.

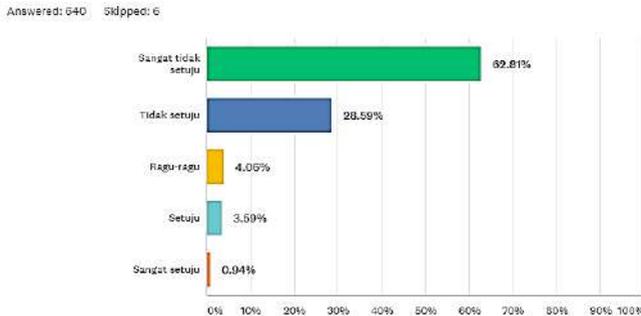
Berkaitan dengan intoleransi di sekolah, misalnya pemilihan ketua Osis, survei ini juga menemukan bahwa

terdapat 10,17 persen siswa yang menyatakan bahwa ketua OSIS seharusnya dipilih dari kelompok agama mayoritas. Temuan ini juga senada dengan hasil temuan dari lembaga-lembaga survei independen lainnya. Namun demikian, banyak cara yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun guru-guru untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya di SMA Negeri 2 Yogyakarta, kepala sekolah melaksanakan antisipasi dengan menitipkan pesan kepada guru-guru agar guru mengajarkan pelajaran agama yang moderat. Kepada siswa ditanamkan untuk menjunjung tinggi multikultural dan dalam pemilihan osis tidak boleh membahas mengenai sara.



Grafik 4.12 Pemahaman Siswa terhadap Pemilihan Ketua OSIS

Ketika ditanyakan kepada siswa tentang apakah individu dan organisasi masyarakat dapat menggunakan cara-cara kekerasan untuk memperjuangkan keyakinannya? Hasil survei menunjukkan terdapat 4,4 persen siswa yang menyatakan bahwa Individu dan organisasi masyarakat dapat menggunakan cara-cara kekerasan untuk memperjuangkan keyakinannya.



Grafik 4.13 Pemahaman Siswa terhadap Tindakan Organisasi Masyarakat

Dalam Pancasila terutama sila ke-empat, Kerakyatan yang Dipimping oleh Hikmat, Kebijakan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan sesungguhnya menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai demokrasi, musyawarah dan saling menghargai pendapat dalam pemilihan pimpinan organisasi maupun dalam melaksanakan keinginan (visi dan misi) organisasi tanpa adanya paksaan atau kekerasan.

Di Indonesia banyak sekali organisasi masyarakat (Ormas) yang mengatas namakan agama, seringkali ormas tersebut melakukan tindakan-tindakan kekerasan mengatasnamakan agama seperti melakukan sweeping terhadap tempat-tempat maksiat serta banyaknya muncul Ormas yang berideologikan agama dan menginginkan Negara Indonesia menjadi negara agama.

Sesungguhnya fenomena tersebut memang bertentangan dengan Pancasila. karena disila ke dua dijelaskan bahwa "kemanusiaan yang adil dan beradab" yang berarti masyarakat Indonesia memiliki keadilan yang sama dan beradab. fenomena tersebut bisa saja menjadi tidak bertentangan dengan Pancasila asalkan tidak melakukan kekerasan mengatas namakan agama dan

tidak menginginkan negara Indonesia sebagai negara agama karena Indonesia itu sudah memiliki sebuah semboyan penyatu bangsa yaitu Bhineka Tunggal Ika, meskipun berbeda agama, budaya, dan suku tetapi tetap satu.

Pada kondisi ini, pihak sekolah-sekolah yang merupakan sekolah sampel survei, telah melakukan antisipasi dengan berbagai cara. Di SMA Negeri 1 Malang, misalnya, pihak sekolah telah melarang siswanya untuk mengunjungi kegiatan *Book Fair* yang diadakan oleh sebuah organisasi keagamaan. Hasil pengamatan kepala sekolah dan para ulama, menyatakan bahwa isi buku-buku yang dipamerkan dalam *book fair* tersebut sangat beraliran keras dan mengajak supaya anti-Pancasila serta anti hormat kepada bendera dan sehingga menurut kepala sekolah belum layak menjadi konsumsi pelajar.

a. Hasil Studi Terdahulu dan Negara Lain

Hasil Studi Terdahulu

Hasil survei radikalisme di lingkungan sekolah dari berbagai Lembaga/Institusi menunjukkan telah terdapat indikasi adanya pelajar dan guru yang terpengaruh oleh paham radikalisme. Mereka setuju jika dasar Negara Pancasila diganti dengan paham yang lain, setuju dengan gerakan radikal (ISIS), kekerasan dapat dipakai untuk mencapai kehendak, dan tindakan intoleransi lainnya. Lembaga/intitusi tersebut yakni:

- 1) SETARA Institute for Democracy and Peace (SIDP) : Laporan Survey Toleransi Siswa SMA Negeri Di Jakarta & Bandung Raya, 2016 dan 2015;

Dalam Laporan Survey Toleransi Siswa SMA Negeri Di Jakarta dan Bandung Raya 2016, SIDP

menemukan bahwa 5,8% siswa mendukung mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, 3,9% siswa menganggap kelompok lain kafir dan sesat, 6,8% siswa menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan keyakinan, 4,6% siswa melarang pendirian rumah ibadah. Survei tersebut juga menemukan bahwa 30,8% siswa setuju Ketua Kelas/OSIS harus satu agama, 38,0% memilih Bupati/Walikota/Gubernur yang satu seagama, dan 11,3% siswa menganggap Khilafah merupakan sistem pemerintahan yang paling baik untuk diterapkan di Indonesia saat ini.

- 2) Wahid Foundation: “Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial Keagamaan di Kalangan Muslim Indonesia”, 2016;

Tahun 2016 Wahid Foundation melakukan survei Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial Keagamaan di kalangan Muslim Indonesia. Responden survei tersebut adalah umat Islam berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah. Hasil survei menyebutkan bahwa 59,9 % memiliki kelompok yang dibenci, yakni mereka yang berlatar belakang agama non muslim, kelompok tionghoa, komunis, dan selainnya, dari jumlah 59,9 persen itu, sebanyak 92,2 persen tak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia, dan 7,7 % bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan sebanyak 0,4 persen justru pernah melakukan tindakan radikal.

Pada tahun yang sama Wahid Foundation juga menerbitkan laporan Riset Potensi Radikalisme di kalangan Aktivistis Rohani Islam Sekolah-Sekolah Negeri. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa

33% responden mengartikan jihad sebagai berperang dan mengangkat senjata melawan orang kafir; 78% responden mendukung ide kekhilafahan; 17% responden setuju bahwa orang murtad dibunuh; 10% responden mendukung bom Sarinah; dan 6% responden mendukung ISIS.

- 3) Maarif Institute, 2017. Penelitian Penguatan Institusi Sekolah Melalui Kebijakan Internal Sekolah yang Mengokohkan Kebinekaan: Kota Banda Aceh, Kabupaten Lebak, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Mataram, dan Kota;
- 4) Puslitjak Dikbud (2016): Kajian Pendidikan Kebhinekaan Pada Satuan Pendidikan Menengah; Senada dengan survei SIDP tersebut, Kajian Pendidikan Kebhinekaan Pada Satuan Pendidikan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud menunjukkan bahwa 8,2 % siswa setuju-sangat setuju Ketua OSIS dari agama yang sama, 6,8% siswa merasa menganggap sebaiknya Ketua OSIS dari Etnis yang sama. Namun demikian kajian tersebut juga menemukan adanya praktik baik pendidikan baik yang dilakukan melalui kebijakan sekolah maupun peran guru. Beberapa praktik baik tersebut diantaranya adalah pembauran antar siswa yang bhineka, memberikan ruang/wadah aktualisasi budaya-agama pembiasaan penumbuhan budi pekerti, program afirmasi lintas etnis, pembelajaran menarik, dan pemahaman kebangsaan dan aktualisasi

- 5) Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP, 2011): Hasil Survei LaKIP tentang kekerasan bermerek agama di kalangan pelajar;
- 6) Mujani Research Consulting (SRMC) pada Desember 2015 dan 2007.

Tabel berikut merupakan rangkuman dari beberapa hasil kajian dari lembaga-lembaga survei terkait dengan adanya gejala paham radikalisme di kalangan pelajar.

Tabel 4.1 Rangkuman Hasil Kajian Radikalisme

No	Kondisi: Praktek Baik/ Segi Positif dan Penyimpangan	Penyebab/Permasalahan
A	<p>SETARA <i>Institute for Democracy and Peace</i> (SIDP) :Laporan Survey Toleransi Siswa SMA Negeri Di Jakarta & Bandung Raya, 2016 dan 2015.</p> <p>Penyimpangan temuan 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5,8% siswa mendukung mengganti Pancasila sebagai dasar Negara (hal 21) 3,9% siswa menganggap kelompok lain kafir dan sesat 6,8% siswa menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan keyakinan 4,6% siswa melarang pendirian rumah ibadah 30,8%siswa setuju Ketua Kelas/OSIS harus satu agama (hal 22) 38,0% memilih Bupati/Walikota/Gubernur yang satu seagama 11,3% siswa menganggap Khilafah merupakan sistem pemerintahan yang paling baik untuk diterapkan di Indonesia saat ini (hal24) 5 responden (0.7%) setuju dengan gerakan ISIS <p>Penyimpangan Temuan 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> 8,5% (58 responden) menyatakan setuju jika Pancasila sebagai dasar 111ltern diganti dengan agama tertentu 7,2% responden yang setuju dengan gerakan ISIS 31,8% responden menyatakan materi pelajaran agama tidak mendukung pemahaman kebhinekaan 	<p>Penyebab:</p> <p>Pola penanaman ide-ide intoleransi melalui guru , kurikulum, dan perjumpaan dengan alumni melalui sistem mentoring keagamaan dengan membimbing pelajar mengaji, disertai dialog-dialog bertema keagamaan.</p> <p>Mentoring digelar atas alasan kurangnya jam pelajaran agama yang hanya dua jam dalam seminggu. Dari kegiatan itulah penyebaran 111lternat tertentu dimulai.(hal 2)</p> <p>Guru PKn tidak mampu menjadikan PKn sebagai sarana efektif memperkuat toleransi.</p> <p>Buku-buku pelajaran juga ditengarai menyebarkan paham intoleransi.Buku pelajaran SMA di Bandung, salah satu babnya menampilkan materi “kebangkitan prajurit Islam”. Salah satu</p>

No	Kondisi: Praktek Baik/ Segi Positif dan Penyimpangan	Penyebab/Permasalahan
		<p>kutipan kalimat di buku itu misalnya, “semua orang yang menyembah Tuhan selain Allah adalah kafir dan pantas dibunuh. (Arzita, 2016; penyebab: hasil studi tahun 2015).</p>
B	<p>Survei Wahid Foundation: “Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial Keagamaan di Kalangan Muslim Indonesia”, 2016.</p> <p>Penyimpangan: Responden adalah umat Islam berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah, menemukan: 59,9 % memiliki kelompok yang dibenci, yakni mereka yang berlatar belakang agama non muslim, kelompok tionghoa, komunis, dan lainnya. Dari jumlah 59,9 persen itu, sebanyak 92,2 persen tak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia. 7,7 % bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan</p>	

No	Kondisi: Praktek Baik/ Segi Positif dan Penyimpangan	Penyebab/Permasalahan
	<p>sebanyak 0,4 persen justru pernah melakukan tindakan radikal. Praktek baik/ Positif: Segi positif: 82,3 persen menyatakan dukungannya kepada Pancasila dan UUD 1945.</p>	
C	<p>Maarif Institute, 2017. Penelitian Penguatan Institusi Sekolah Melalui Kebijakan Internal Sekolah yang Mengokohkan Kebinekaan: Kota Banda Aceh, Kabupaten Lebak, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Mataram, dan Kota Makassar.</p>	
	<p>Temuan: Produk kebijakan di tingkat pusat maupun daerah dan sekolah, tidak ada yang secara spesifik berkaitan dengan penguatan atau pelemahan kebinekaan. Kendati demikian, terdapat anasir-anasir yang menguatkan/ memperlemah Kebinekaan, termuat dalam: Peraturan/ kebijakan sekolah tentang (1) Pelatihan Pengembangan Ketakwaan dan Keimanan Melalui Pendidikan Diniyah dan (2) Regulasi Tentang Pemisahan Kelas Laki-laki dan Perempuan di Sekolah Menengah di Kota Banda Aceh yang berasal dari Pemerintah Kota dan Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. (3) Wajib Belajar Baca Tulis Qur'an di Kab. Pandeglang yang berasal dari Pemkab. (4) Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Pemkab Cianjur) dan (5) Jabar Menghawal (Pemprov Jawa Barat). (6) Inub tentang Gerakan Sholat Subuh Berjamaah di Mesjid dan (7) Perub tentang Pengelolaan Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Berbasis Masyarakat serta (8) Perub tentang 10 Kebiasaan Akhlak Mulia (Kab. Sukabumi), (9) Libur Fakultatif untuk Siswa</p>	<p>Permasalahan: Terdapat Indikasi proses penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI di sekolah: Sekolah cenderung abai dengan motif dibalik aktivitas alumni, seperti penyebaran pemahaman keagamaan dan internat yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI seperti ide pembentukan khilafah, serta menjadikan siswa sebagai basis dukungan bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan. Pola penetrasi di sekolah melalui pertemuan-pertemuan terbatas (Iiqa) dengan menggunakan modul,</p>

No	Kondisi: Praktek Baik/ Segi Positif dan Penyimpangan	Penyebab/Permasalahan
	<p>Beragama Hindu (Kota Mataram), (10) Sekolah menerima siswa yang berasal dari suku, agama, ras dan budaya apapun kecuali SMAN 10 Kota Banda Aceh yang hanya menerima siswa muslim; (11) Pembedaan Imtaq di SMAN 1 Cibadak Kab. Sukabumi yang menyebabkan Upacara Bendera diselenggarakan dua minggu sekali;</p> <p>Selain itu ditemukan Kebiasaan berupa: (1) Transmisi Pengetahuan melalui Pembelajaran; (2) SDM Guru yang Mengampu Mata Pelajaran PKN, Sejarah dan PAI; (3) Upacara Bendera; (4) Pelaksanaan Imtaq (Iman dan Taqwa); (5) Urutan Warga Sekolah Bagi Siswa Kurang Mampu dan Terkena Musibah; (6) Beasiswa Bagi Siswa yang Kurang Mampu; (7) Beasiswa Bagi Siswa yang Berprestasi Secara Akademik dan Non-Akademik Tanpa Memandang SARA; (8) Akses terhadap Fasilitas Tempat Ibadah kendati Belum Merata; (9) Akses terhadap Pembina (Pemateri) Keagamaan kendati Belum Merata; (10) Dukungan Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Keagamaan; (11) Dukungan Kegiatan Ekstrakurikuler Berbasis Keagamaan; (12) Pengaturan Seragam Sekolah; (13) Peran OSIS dan Organisasi Ekstrakurikuler. Kesepakatan Bersama berupa Pendaftaran Siswa Aliran Kepercayaan menjadi Islam untuk keperluan database sekolah karena tidak tersedia kolom Sunda Wiwitan.</p>	<p>mentoring dan bahan-bahan bacaan berupa buku terjemahan dan internet yang berisi pandangan anti-kebinekaan yang diterbitkan oleh pihak tertentu. Pola lain adalah penetrasi ideologis oleh organisasi yang memainkan peran transnasional yang memainkan peran yang cukup signifikan bagi proses yang terjadi di sekolah; antara lain: melakukan mentoring dan pendampingan kegiatan ekstrakurikuler serta penetrasi terhadap para tenaga pengajar sekolah. Pola tersebut menjadi lazim dilakukan sebagai upaya memperkuat penetrasi ideologis yang pada dasarnya bertentangan dan cenderung meruntuhkan sendi-sendi kebangsaan yang didasarkan pada 114Iternat Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
D	<p>Pustijak Dikbud (2016); Kajian Pendidikan Kebinekaan Pada Satuan Pendidikan Menengah</p>	

No	Kondisi: Praktek Baik/ Segi Positif dan Penyimpangan	Penyebab/Permasalahan
E	<p>Penyimpangan: 8,2 % siswa setuju-sangat setuju Ketua OSIS dari agama yang sama 6,8% siswa merasa mengganggu sebaiknya Ketua OSIS dari Etnis yang sama.</p> <p>Praktik baik Pendidikan Kebhinekaan: Kebijakan Sekolah Pembauran antar siswa yang bhineka Memberikan ruang/wadah aktualisasi budaya-agama Pembiasaan penumbuhan budipekerti Program afirmasi lintas etnis Peran Guru Pembelajaran menarik Pemahaman kebangsaan dan aktualisasi</p>	<p>Permasalahan/ Kendala Penerapan pendidikan kebhinekaan: Sikap warga sekolah: masih kuat primordial keluarga, pemahaman agama sempit (eksklusif), sulit memantau kegiatan siswa di luar Kebijakan sekolah: Kemampuan kognitif masih prioritas dan Keterbatasan sumberdaya</p>
	Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP, 2011): Hasil Survei LaKIP tentang kekerasan bermerek agama di kalangan pelajar	

No	Kondisi: Praktek Baik/ Segi Positif dan Penyimpangan	Penyebab/Permasalahan
	<p>Penyimpangan: Paham (Ideologi) Radikalis: 12,1 % siswa setuju organisasi radikal 23,6 % guru PAI setuju organisasi radikal 25% siswa menyatakan Pancasila tidak relevan 21% guru PAI menyatakan Pancasila tidak relevan</p> <p>Tindakan: 52,3 % siswa setuju pengrusakan dan pengegelan rumah ibadah bermasalah. 40,9 % guru PAI setuju pengrusakan dan pengegelan rumah ibadah yang bermasalah</p>	<p>Penyebab kekerasan berlabel agama marak adalah kurikulum dan guru agama PAI. Ideologi terorisme berhasil menyusup masuk melalui mata pelajaran PAI dan guru-guru agama PAI.</p>
F	<p>Wahid Foundation 2016: Laporan Riset Potensi Radikalisme di Kalangan Aktivist Rohani Islam Sekolah-Sekolah Negeri</p>	
	<p>33% responden mengartikan jihad sebagai berperang dan mengangkat senjata melawan orang kafir. 78% responden mendukung ide kekhilafahan 17% responden setuju bahwa orang murtad dibunuh. 10% responden mendukung bom Sarinah 6% responden mendukung ISIS</p>	
G	<p>Saiful Mujani Research Consulting (SRMC) pada Desember 2015 dan 2007, menemukan:</p>	

No	Kondisi: Praktek Baik/ Segi Positif dan Penyimpangan	Penyebab/Permasalahan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4% warga berusia 22-25 tahun dan 5% warga yang masih sekolah/kuliah yang mengenal ISIS menyatakan setuju dengan apa yang diperjuangkan ISIS (2015). 2. Mayoritas muslim menolak ISIS. Penolakan tersebar merata di semua di kategori jender, desa-kota, umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, wilayah, etnis, dan agama. Di semua kelompok itu, yang menyatakan ISIS boih didirikan di Indonesia, pada umumnya hanya sekitar 0-2% (2015). 3. 9,3% setuju Negara diganti dengan Negara Islam atau khilafah (2017). 4. Dari 66,4% yang tahu ISIS, 2,7% setuju/sangat setuju perjuangan ISIS (2017) 	
H	Puslitjak Dikbud (2017): Kajian Radikalisme di Kalangan Pelajar: Studi Cepat (Awa) di Kabupaten Cilacap	
	Berdasarkan keterangan informan (Ketua FKUB Cicap): di beberapa SMA dan SMP Cilacap terdapat guru yang menyampaikan paham khilafah kepada para siswa 117/tema sikap penolakan terhadap dasar 117/tema Pancasila. Ada empat guru di SMPN 2 Sidareja yang selalu tidak mau mengikuti upacara bendera, hormat bendera, membaca dan menyanyikan Pancasila. Seluruhnya terdapat empat guru dan satu ketua komite yang berpandangan demikian. Mereka adalah Sudarti (guru PKn), Bashir (guru olahraga), Suratno (guru bahasa Indonesia-saat ini sudah pensiun), Taufik (guru Matematika) dan Sukanto (Ketua Komite 2001-2014). Beberapa dari nama	Beberapa guru di Cilacap “dekat” dengan organisasi yang mengusung gagasan khilafah, HTI (Keterangan kepolisian) Sampai saat ini tidak ada semacam pedoman yang dapat dijadikan dasar pihak kepolisian untuk melakukan pembinaan di sekolah (disampaikan oleh Kanit Bimbingan Masyarakat,

No	Kondisi: Praktek Baik/ Segi Positif dan Penyimpangan	Penyebab/Permasalahan
	<p>itu (Bashir, Suratno, dan Sukanto) bahkan telah masuk dalam catatan aparat penegak hukum karena mereka menjenguk Ust. Abu Bakar Baasyir di LP. Nusa Kambangan. Hal ini diketahui Pak Beni dari Danramil kecamatan Sidareja (Kasus 2013, sudah dilakukan pembinaan)</p> <p>Terdapat tiga guru di SMPN1 sidareja yang berafiliasi dengan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia). Ketiganya adalah H. Sugiyanto (guru Bhs. Indonesia), Suyamto (guru Bahasa Indonesia), dan Jaswan (guru Matematika). Mereka yang tergabung dalam LDII ini menganggap umat islam lain sebagai kafir sehingga tidak mau beribadah bersama dengan orang di luar kelompok mereka.</p> <p>Terdapat seorang karyawan TU SMAN 1 Cilacap yang seringkali menyampaikan gagasan tentang khilafah saat menjadi Khatib shalat Jum'at di Sekolah. Tidak secara spesifik menentang dasar Negara Pancasila (penjelasan alumni SMAN 1 Cilacap)</p>	<p>Polsek Sidareja). Para guru jarang mendampingi siswa pada Jumatan dan kegiatan Rois di sekolah</p>

b. Kondisi Radikalisme di Negara-Negara Lain

Tidak hanya Indonesia, di negara-negara lain pun, masuknya paham-paham radikalisme juga terjadi. Walaupun kondisi dan penyebabnya berbeda, namun indikasi masuknya paham-paham radikalisme tersebut telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah di negara-negara tersebut. Tabel berikut menggambarkan kondisi, penyebab dan solusi terhadap paham radikalisme di beberapa negara.

No	NEGARA	KONDISI	PENYEBAB	SOLUSI
1	Australia	<p>1. 200 warga Australia yang berniat melakukan perjalanan ke Timur Tengah termasuk Suriah mereka bergabung dengan ISIS, mereka telah dicegat polisi Australia (IRNA dalam Agus SB, 2016).</p> <p>2. Menteri Imigrasi Peter Dutton hari Rabu (25/3/2015) menjelaskan seorang remaja 17 tahun dicegat pada 12 Maret 2015 di terminal keberangkatan internasional karena akan bergabung dengan ISIS . (Agus SB, 2016:123)</p>	<p>1. Menteri Imigrasi Australia menginformasikan bahwa banyak diantara para pemuda ini memutuskan untuk pergi ke Irak dan Suriah setelah mengakses jejaring sosial dan internet (IRIB Radio, 25 Maret 2015) (Agus SB, 2016:123).</p> <p>2. Anak muda ini tanpa sepengetahuan orang tua mereka mengunduh dan menerima beragam informasi media sosial dan rinternet. Kelompok mematkan ini (ISIS) berhasil menjangkau pikiran anak muda Australia melalui layar komputer, mencuci otak mereka dan ini menyulitkan negara-negara Barat saat ini (Radio Australia, 25 Maret 2015) (Agus SB, 2016:124)</p>	<p>Rekomendasi Agus Surya Bakti, 2016:</p> <p>Pentingnya Penguatan Regulasi</p> <p>Penanggulangan tindakan dan aksi terorisme harus pula menyentuh upaya pencegahan-gulangan dan pencegahan sejak pra-aksi. Dalam konteks pencegahan terorisme di dunia maya, aspek regulasi menjadi sangat penting untuk dikuatkan. Pemerintah harus segera memikirkan masivitas dan dampak yang timbul dari terorisme di dunia maya yang lambat laun telah mengotori ruang bermain dan sarana pengetahuan anak-anak muda kita melalui media internet.</p>

No	NEGARA	KONDISI	PENYEBAB	SOLUSI
				<p>Simergitas Negara dengan Masyarakat</p> <p>Peran seluruh komponen masyarakat dari unit paling kecil keluarga, tokoh agama, guru, dosen, insan media, dan lainnya merupakan mitra strategis yang sangat efektif dalam membendung pengaruh radikalisme di dunia maya.</p>
2	Amerika Serikat	FBI mencatat adanya kasus pelajar antara 13-18 tahun yang masuk dalam jaringan kelompok ekstrim.	Penyebaran paham radikal di kalangan pelajar diantaranya terjadi melalui komunikasi online dengan kelompok-kelompok radikal.	<ol style="list-style-type: none"> a. Membentuk Tim Penanganan Ancaman dan Prosedur intervensi untuk siswa yang diduga terpapar paham radikal. b. Pelatihan bagi guru dan karyawan sekolah c. Sekolah diwajibkan menjalin kerjasama dengan para pihak

No	NEGARA	KONDISI	PENYEBAB	SOLUSI
				(praktisi kesehatan mental, aparat hukum, pelayan sosial, dll) untuk mengankal penyebaran paham radikal.
3	Myanmar	Fenomena anti-muslim oleh biksu-biksu Budha dalam gerakan 969. Gerakan ini didukung oleh sebagian aparat pemerintah.		Otoritas pemerintah membatasi akses etnis Rohingya untuk mendapatkan pendidikan di tingkat universitas dengan alasan untuk mencegah terjadinya kekerasan.
4	Kanada	<ul style="list-style-type: none"> a. Guru-guru di sekolah Islam swasta menyebarkan ideologi muslim ekstrim kepada para siswa (Raheel Reza, 2013) b. Rekrutmen kelompok ekstrim juga terjadi di Universitas melalui aktivitas-aktivitas informal. 		
5	Bangladesh	<ul style="list-style-type: none"> a. Lebih dari 50 kelompok ekstrim dan 10 partai politik berbasis agama memiliki organisasi sayap di tingkat 		Melalui telaah atas buku-buku teks yang digunakan di

No	NEGARA	KONDISI	PENYEBAB	SOLUSI
		<p>pelajar.</p> <p>b. Perkembangan jumlah madrasah swasta tak berijin ditengarai menjadi salah satu jalur penyebaran paham radikal.</p>		<p>sekolah, Pemerintah cenderung menghindari tema-tema kontroversial termasuk diantara isu radikalisme ini.</p>
6	Korea Selatan	<p>Seorang remaja Korea Selatan yang hilang di Turki menyatakan ingin bergabung dengan ISIS. Keinginan remaja berusia 18 tahun ini ditontarkan melalui akun Twitter atas nama Sunni Mujahideen miliknya. Remaja yang diidentifikasi dengan nama keluarga Kim ini diperkirakan telah menyeberang ke Suriah</p>	<p>Seorang polisi senior Chung Jae-II, di Seoul seperti yang dikutip Channel News Asia, Rabu (21/1) mengatakan bahwa Kim menuliskan serangkaian pesan di akun Twitter miliknya untuk meminta informasi mengenai cara bergabung dengan ISIS (Agus SB, 2016:124).</p>	

B. Penyebab Paham dan Tindakan Radikalisme

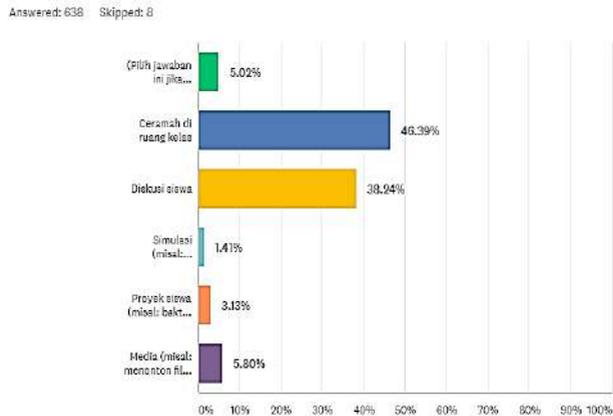
1. Faktor Guru

SIDP (2015) menyebutkan terdapat beberapa hal yang mendorong masuknya paham radikal di lingkungan sekolah, antara lain melalui guru, kurikulum dan alumni. Melalui alumni biasanya dilakukan dengan sistem mentoring keagamaan dengan membimbing pelajar mengaji, disertai dialog-dialog bertema keagamaan. Disisi lain, guru PPKn tidak mampu menjadikan PPKn sebagai sarana efektif memperkuat toleransi. Buku-buku pelajaran juga ditengarai menyebarkan paham intoleransi. Buku pelajaran SMA di Bandung, salah satu babnya menampilkan materi “kebangkitan prajurit Islam”. Salah satu kutipan kalimat di buku itu misalnya, “semua orang yang menyembah Tuhan selain Allah adalah kafir dan pantas dibunuh. (Arzita ,2016; penyebab: hasil studi tahun 2015).

Hasil survei yang dilakukan pada kajian ini menemukan kondisi yang serupa bahwa faktor guru juga merupakan salah satu penyebab terjadinya paham radikalisme tersebut. Kecenderungan penyebab metode pengajaran yang disampaikan kepada siswa dilaksanakan oleh guru dilakukan secara monoton dan membosankan. Ketika menerangkan pelajaran yang seharusnya mudah bisa menjadi sangat sulit dipahami ketika seorang guru menerangkannya secara monoton yang menyebabkan siswa ngantuk dan bosan di kelas, mungkin titik bosan itu datang karena seorang guru tidak memiliki metode yang baik untuk berkomunikasi dengan siswanya dan kesannya guru itu hanya berkepentingan untuk menyampaikan materi sebanyak mungkin untuk mencapai target supaya mendapat gaji yang diinginkan

dan tidak mempedulikan siswanya akan memahami materi tersebut atau tidak. Mungkin siswanya juga yang keterlaluhan hanya melihat guru yang sabar dan tidak berusaha memahami maksud yang di sampaikan.

Misalnya pada pelajaran Pendidikan Kebhinekaan. Survei yang ditanyakan pada siswa SMA bagaimana metode pengajaran yang disampaikan oleh guru PPKn. Sebanyak 46,39% (agregat) menyatakan bahwa metode pengajaran dilakukan melalui metode ceramah. Walaupun jumlah yang menyatakan bahwa metode tersebut tidak menarik (13,5%), namun disinyalir sebagian besar siswa menyatakan metode ceramah tersebut memang membosankan.

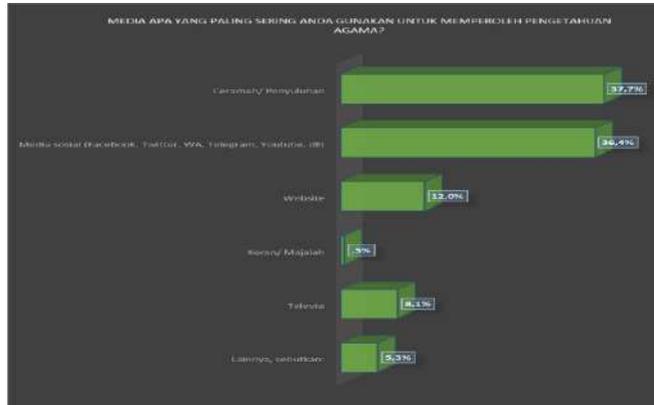


Grafik 4.14 Metode Pengajaran yang Disampaikan Guru PPKn

Survei dalam studi ini juga menemukan beberapa hal yang mendorong tumbuhnya paham radikal di lingkungan sekolah. Pertama, guru PPKn maupun guru agama memang telah mengajarkan nilai-nilai

kebhinekaan namun para guru tersebut umumnya hanya menggunakan metode ceramah. Bagi sebagian siswa metode pengajaran semacam ini dianggap tidak menarik. Kedua, para siswa juga melihat adanya terdapat program penguatan nilai kebhinekaan yang dilakukan oleh sekolah (85,6%), namun sayangnya sebagian besar program tersebut dilakukan dengan cara konvensional (ceramah, seminar). Ketiga, semakin mudahnya akses informasi kepada para siswa. Sebesar 48,4% menjadikan media online sebagai sumber utama untuk memperoleh pengetahuan agama. Sayangnya sebagian informasi tersebut belum tentu benar dan siswa juga seringkali tidak memiliki kemampuan memverifikasi kebenaran informasi dalam media online. Disinilah tuntutan seorang guru profesional harus berinovasi dalam menyampaikan materi pembelajaran.

Dalam sudut pandang ilmu didaktik, para pengajar harus menerapkan metode yang tepat agar pelajaran yang ia sampaikan tidak membosankan. Pelajaran PPKn dianggap yang “rawan” dalam hal ini, biasanya pelajaran PPKn yang disampaikan dengan metode satu arah, cenderung lebih membosankan dari pada metode belajar dua arah. Dalam mata pelajaran Sosiologi yang berisi analisa dari para sosiolog tentang gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat, jika sang pengajar menjelaskan pelajaran ini dengan gaya yang monoton, tidak jarang akan menimbulkan perasaan bosan yang dapat memecah konsentrasi belajar para siswa. Demikian juga dengan ilmu Sejarah, jika guru tidak pandai menerangkan dan menyampaikannya kepada para siswa, bisa-bisa malah menjadi dongeng empuk pengantar tidur.



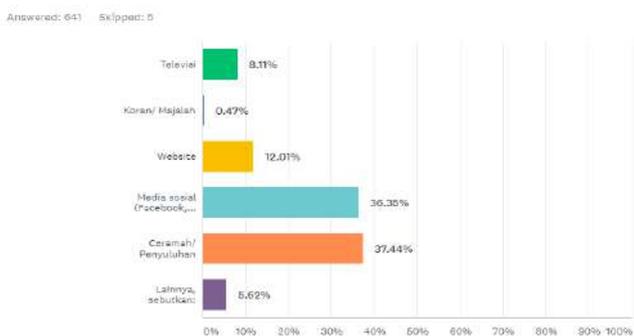
Grafik 4.15 Media yang Paling Sering Digunakan Untuk Memperoleh Pengetahuan Agama

2. Faktor Eksternal Guru

Selain faktor guru, Maarif Institute (2017) menyatakan bahwa tumbuhnya paham radikal di lingkungan sekolah salah satunya karena sekolah cenderung abai dengan motif dibalik aktivitas alumni, seperti penyebaran pemahaman keagamaan dan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI seperti ide pembentukan khilafah, serta menjadikan siswa sebagai basis dukungan bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan. Sebagaimana temuan SIDP, Maarif Institute juga menemukan adanya pola penetrasi di sekolah melalui pertemuan-pertemuan terbatas (*liqa*) dengan menggunakan modul, mentoring dan bahan-bahan bacaan berupa buku terjemahan dan Internat yang berisi pandangan anti-kebinekaan yang diterbitkan oleh pihak tertentu. Pola lain adalah penetrasi ideologis oleh organisasi massa bertaraf transnasional yang memainkan peran yang cukup signifikan bagi proses yang terjadi di sekolah; antara lain: melakukan mentoring dan pendampingan kegiatan ekstrakurikuler

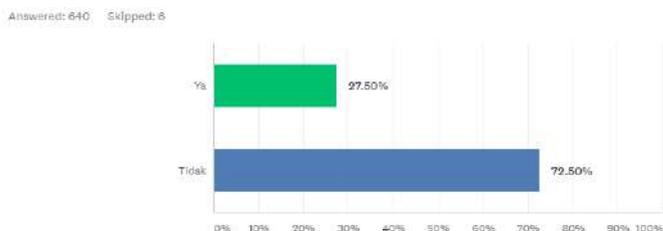
serta penetrasi terhadap para tenaga pengajar sekolah. Pola tersebut menjadi lazim dilakukan sebagai upaya memperkuat penetrasi ideologis yang pada dasarnya bertentangan dan cenderung meruntuhkan sendi-sendi kebangsaan yang didasarkan pada paham Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Faktor lain sebagai sumber masuknya paham radikalisme dan intoleransi adalah kemudahan akses internet. Kemajuan teknologi khususnya dengan dikenalnya teknologi internet memberi peluang lebih besar bagi generasi muda untuk mengakses informasi, termasuk informasi mengenai agama. Sebanyak 36,35 persen responden menyatakan bahwa media sosial (facebook, twitter, youtube, wa, dll) merupakan media yang paling sering digunakan untuk mendapatkan pengetahuan agama. Sebanyak 12,01 persen responden yang lain mendapatkan informasi agama paling banyak dari website. Di luar itu, 37,44% responden mendapatkan pengetahuan agama paling banyak dari cara yang lebih konvensional melalui ceramah-ceramah keagamaan.



Grafik 4.16 Media Informasi Pengetahuan Agama

Pengetahuan agama juga diperoleh dari keikutsertaan para siswa ini pada organisasi keagamaan di luar sekolah. Sebanyak 27,50 persen responden menyatakan mengikuti organisasi keagamaan di luar sekolah. Organisasi keagamaan yang mereka ikuti antara lain: remaja masjid, remaja gereja, Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama, dsb. Keluarga tentu saja juga berperan penting bagi penanaman nilai kebinekaan kepada generasi muda. Sebanyak 96,8% responden siswa menyatakan bahwa mereka juga mendapatkan pendidikan kebinekaan dari orang tua mereka di rumah.

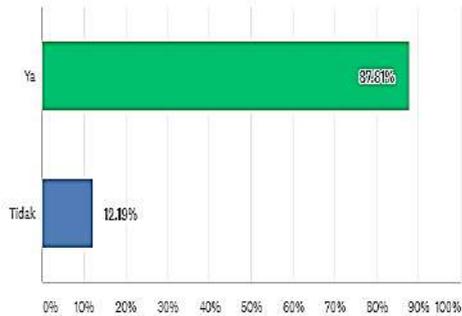


Grafik 4.17 Keikutsertaan Siswa dalam Organisasi Keagamaan

Para siswa secara umum juga telah mendapatkan pendidikan kebinekaan dari guru-guru mereka di sekolah, khususnya melalui mata pelajaran PPKn dan Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Walaupun demikian, layak dicatat juga pandangan beberapa siswa yang melihat guru dari dua mata pelajaran tersebut tidak memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebinekaan. Survei ini menunjukkan 5,02 persen responden siswa menyatakan bahwa guru PPKn tidak memberikan pendidikan kebinekaan kepada mereka. Sementara itu, 12,19 persen siswa juga menyatakan bahwa guru agama

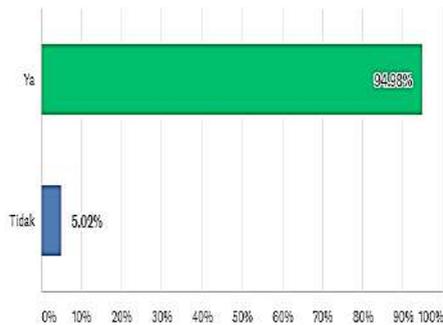
mereka tidak mengajarkan pendidikan keagamaan kepada mereka.

Answered: 640 Skipped: 6



Grafik 4.18 Guru PPKn Mengajarkan Pendidikan Kebinekaan

Answered: 638 Skipped: 8



Grafik 4.19 Guru PA/BP Mengajarkan Pendidikan Kebinekaan

C. Upaya Pencegahan

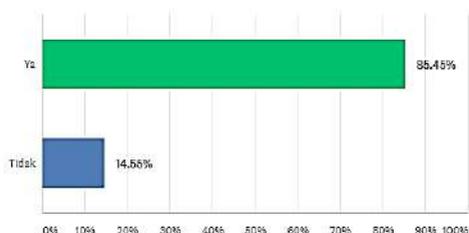
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangkal maupun menanggulangi masuknya paham radikal di lingkungan sekolah. Upaya-upaya tersebut dilakukan baik oleh Pemerintah (pusat maupun daerah), sekolah, orang tua, maupun masyarakat. Terkait hal ini, Kemendikbud misalnya telah menerbitkan kebijakan penumbuhan budi pekerti pada 2015. Pada 2016, kebijakan tersebut semakin dikuatkan dengan dijadikannya Program Penguatan Pendidikan Karakter sebagai salah satu program utama Kemendikbud. Di tingkat daerah, studi kami di Cilacap juga mencatat bahwa dinas melakukan pembinaan melalui pengawas sekolah untuk menangkal bahaya radikalisme di lingkungan sekolah.

Beberapa sekolah juga telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan masuknya paham radikal. Di Cilacap tercatat adanya pembinaan dari pihak sekolah terhadap guru/ karyawan sekolah yang teridentifikasi menganut paham radikal. Beberapa sekolah juga telah bekerjasama dengan aparat penegak hukum terutama untuk penguatan nilai nasionalisme siswa. Telah dilakukan pula berbagai kegiatan ekstra kurikuler untuk penguatan karakter siswa. Selain itu, diadakan pula berbagai kegiatan yang melibatkan siswa dari berbagai pemeluk agama dalam kegiatan keagamaan (misalnya: penyembelihan hewan kurban).

Secara khusus, sekolah juga telah mengadakan program/ kegiatan untuk menanamkan nilai kebinekaan kepada siswa. Upaya yang dilakukan sekolah misalnya melalui seminar/ penyuluhan, melibatkan siswa dalam kegiatan keagamaan lainnya, hingga kemah kebangsaan. Namun demikian upaya ini masih perlu ditingkatkan terutama dengan mengadakan program yang lebih inovatif. Hal ini karena sebanyak 19,9% responden belum melihat sekolah

mengadakan kegiatan/program penguatan nilai-nilai kebinekaan.

Answered: 639 Skipped: 7



Grafik 4.20 Sekolah melakukan program-program penguatan nilai-nilai kebinekaan kepada siswa

Seperti halnya di kota Malang, beberapa kepala sekolah dalam DKT menyatakan bahwa pihak sekolah telah melakukan upaya-upaya mencegah terhadap masuknya paham radikalisme dan intoleransi, diantaranya yang berhasil dirangkum sebagai berikut:

1. Dinas pendidikan provinsi sering juga mengadakan sosialisasi masalah penguatan pendidikan karakter baik itu melalui pengawas kepala sekolah dan bapak ibu guru tetapi masih dirasakan kurang apalagi tiap daerah memiliki karakter wilayah yang sangat berbeda. Oleh sebab itu melalui sekolah ini sudah berupaya untuk memberikan layanan dengan berbagai macam tetapi masyarakat masih menyamakan satu dengan yang lainnya akhirnya berbenturan masalah tersebut ada permasalahan di sekolah A belum tentu sama dengan permasalahan di sekolah B, cara penanganannya juga berbeda.
2. Pihak Dinas Pendidikan sudah bekerja sama dengan pihak Pol PP yang namanya operasi sayang dan ini dikembangkan termasuk kepada PNS Jadi kemarin

terjadi ada kepegang jam sekolah sekolah mereka pulang sekolah dan ini juga demikian masyarakat langsung kromonya ke sekolah padahal sekolah sudah memberikan sosialisasi.

3. Harus ada aturan dari Pusat tidak hanya disosialisasikan kepada Dinas Pendidikan saja tetapi juga disosialisasikan kepada masyarakat yang lain mungkin melalui Dinas Sosial atau mungkin melalui Kementerian lain langsung turun ke masyarakat. Jangan sampai hanya siswa gara-gara dicubit lalu masuk ke Kepolisian nanti fungsi guru sebagai pendidik tidak ada.
4. Di aula Kodam itu secara periodik diselenggarakan Islamic Book Fair yang ternyata banyak bukunya radikal semuanya mengajak supaya anti-pancasila anti hormat bendera.
5. Terdapat upaya untuk mencegah radikalisme dari sekolah dengan mendengarkan ceramah dan bimbingan seorang tokoh dengan melakukan pengajian dan istighosah setiap malam Minggu dan malam Jumat untuk memberikan masukan-masukan supaya jangan belajar agama dari dari YouTube dari internet.
6. Di sekolah telah terdapat upaya-upaya untuk masukan-masukan tentang bagaimana perlunya cinta negara itu adalah sebagian dari iman. Dan, mencintai tanah air itu adalah sebagian dari iman.
7. Apa yang menjadikan anak-anak itu menjadi radikal yaitu karena dalam menjalankan keyakinan agamanya merasa yang paling benar.
8. Secara normatif sudah dilakukan pembinaan dari Pengawas Sekolah tetapi kalau dalam proses

pembelajaran banyak ceramah yang mengandung unsur-unsur radikal itulah kondisi di luar jalur.

9. Terdapat inisiatif untuk membentuk kerukunan umat beragama pelajar tetapi tidak direspon oleh Kemenag alasan pada waktu itu memang tidak masuk dalam DIPA.
10. Dulu menurut informasi banyak sekali siswa SMA 3 Malang yang tidak mau hormat bendera tetapi perkembangan berikutnya sudah tidak ada.
11. Dulu di SMA 1 ada yang tidak mau menata karpet untuk istighosah karena berpandangan bahwa haram untuk beristighosah.
12. Guru-guru ini yang jelas-jelas memiliki organisasi HTI seharusnya mendapat tindakan tegas melalui Dinas Pendidikan.
13. Meskipun hasil penelitian sementara di Kota Malang menunjukkan angka yang kecil terkait dengan radikalisme tetapi perlu diwaspadai.
14. Pada prinsipnya Sekolah Kota Malang telah mencoba untuk melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus mendorong penguatan karakter.
15. Setiap kegiatan-kegiatan upacara yang dilakukan termasuk di dalamnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya pada umumnya dilakukan semua kebijakan itu,
16. Pengawas Sekolah mempunyai program kerja tahunan program semester rencana pengawasan akademik, rencana pengawasan managerial itu berbasis pada penguatan 5 nilai karakter.

17. Terdapat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan karakter di sekolah, yaitu antara lain: upacara setiap hari Senin, dan sekali-kali kita mendatangkan dari Polres kemudian dari Koramil; setiap hari kami juga sudah melakukan kegiatan imtaq yang dipimpin guru agama secara bergantian lima belas menit setiap pagi kemudian anak-anak non muslim ada doa pagi untuk yang Nasrani, Katolik dan Hindu; ada juga kegiatan literasi; menyanyikan lagu Indonesia Raya tiga stanza; menyanyikan lagu wajib nasional.
18. Terdapat kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan karakter yang mencegah dari radikalisme itu, ada kegiatan Natal bersama untuk seluruh baik guru maupun GTK maupun siswa itu di kota Malang mulai dari SD, SMP dan SMA itu sudah menjadi agenda setiap tahun. Di sekolah kami ada kegiatan retreat juga, dan setiap ada Istighosah setiap satu bulan sekali, dan setiap Minggu kita belajar Asmaul Husnah.
19. Terdapat kegiatan parenting setiap satu bulan sekali, untuk mengundang para orang tua secara bergantian dalam satu bulan itu kelas 10, 11 dan 12, untuk menyampaikan suatu kerja sama yang baik dengan adanya pendidikan karakter di sekolah.
20. Terdapat pengembangan karakter anak didik yang berfokus pada anak usia dini dan usia sekolah.
21. Di Malang ini terdapat pertemuan rutin satu bulan sekali MGMP SMP, SMK, SMA.
22. Menangkal radikalisme dengan suatu konsep materi pelajaran yang terintegrasi antara nasionalisme dan religius sehingga pendidikan agama di dalamnya sudah ada pendidikan nasionalisme, jangan lagi

dipisah. Sekarang pelajaran PKN intinya pelajaran nasional isinya keblabasan nasional, kemudian pelajaran agama keblabasan agama itu, sampai kapanpun tidak akan ketemu kalau kita tidak mempunyai formula baru untuk menciptakan konsep materi pelajaran yang di dalamnya terdapat secara esensial materi yang dapat menanggulangi maraknya paham radikalisme.

23. Untuk mencegah radikalisme ini mungkin juga bisa ditingkatkan intensitas kemitraan antara pihak sekolah dan seluruh stakeholder seperti dengan tokoh agama, dengan TNI, Polri, dan juga jajaran lainnya dalam rangka untuk memperkuat nasionalisme dan religiusitas secara seimbang, karena titik masalah radikalisme itu tidak seimbang antara nasionalisme dan religiusitas.
24. Terkait dengan pendidikan karakter maka ini terkait dengan yang saya sampaikan tadi kolaborasi dengan guru agama, PKN dan seluruh guru mata pelajaran itu sangat urgen. Guru matematika tidak haram mengatakan bahwa UUD 45 itu tidak bertentangan dengan agama sehingga seluruh walaupun tidak berkapasitas sebagai guru agama dan PKN, dapat membantu program pemerintah dalam mencegah radikalisme.

Beberapa lembaga kemasyarakatan juga telah mengadakan berbagai program untuk menangkal masuknya paham radikal di sekolah. Program-program tersebut diantaranya adalah: peningkatan kapasitas guru (misalnya oleh *ASIA Foundation*), seminar dan diskusi tentang nasionalisme dan kebinekaan di lingkungan sekolah, serta kemah kebinekaan yang diikuti oleh siswa yang beragam (misalnya oleh FKUB Kabupaten Cilacap). Program-program tersebut menunjukkan pentingnya pelibatan masyarakat dalam upaya penangkalan penyebaran paham radikal di sekolah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN

A. Kesimpulan

1. Terdapat indikasi pada sebagian kalangan siswa dan guru yang tidak ingin, atau menentang dan bahkan mengganti dasar ideologi dan dasar Negara Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika-intoleransi dan mengarah mengarah pada paham radikalisme. Kendati persentasenya rendah, indikasi yang mengarah pada paham radikalisme tersebut perlu diwaspadai dan diantisipasi.
2. Indikasi masuknya paham radikalisme di lingkungan sekolah terjadi antara lain karena:
 - a. Pemahaman siswa tentang paham radikalisme yang banyak bersumber dari medsos/ komunikasi online yang sulit dideteksi, diwasi oleh guru dan orangtua;
 - b. lemahnya beberapa guru PPKn dan PAI dalam pelaksanaan pembelajaran yang masih didominasi dengan metode ceramah/hafalan dan kurangnya konten pendidikan kebinekaan dalam buku dan bahan ajar pendukung PPKn dan PAI;
 - c. kebijakan sekolah dalam menyaring dan menseleksi Pembina Rois dari luar sekolah, materi kegiatan Rois, dan pendampingan serta pengawasan siswa di luar luar sekolah; masih lemah.
 - d. belum ada pedoman yang dapat dijadikan dasar pihak kepolisian, sekolah dan Pemda setempat untuk melakukan pembinaan guna pencegahan dan penindakan radikalisme di sekolah;

3. Telah dilakukan upaya dari berbagai pihak untuk mencegah paham radikalisme masuk di lingkungan sekolah:
 - a. menyelenggarakan kegiatan melalui ekstrakurikuler untuk penguatan karakter siswa pada nilai nasionalis dan religius;
 - b. Pengenalan Nasionalisme ketika MOS, bekerjasama dengan kepolisian dan TNI dan pihak terkait untuk pembinaan mental, kedisiplinan, dan cinta tanah air;
 - c. menanamkan ideologi dan menumbuhkan rasa kebangsaan dengan rutin menyelenggarakan upacara bendera, menyanyikan lagu kebangsaan di awal dan di akhir jam pelajaran, dan hari besar nasional;
 - d. pembinaan terhadap guru yang teridentifikasi menganut paham radikal,
 - e. menjalin kerjasama dengan masyarakat antara lain peningkatan kapasitas guru terkait nasionalisme dan kebinekaan (ASIA Foundation), mengadakan seminar/ diskusi tentang nasionalisme dan kebinekaan di lingkungan sekolah dan Kemah Kebinekaan antarsekolah yang diikuti oleh siswa yang beragam latar belakang agamanya.

B. Opsi Kebijakan

Kajian awal ini merekomendasikan untuk menjadikan Program Penguatan Pendidikan Karakter sebagai poros untuk menangkal penyebaran paham radikal di Satuan Pendidikan. Penguatan pendidikan karakter di sekolah dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter terkait dengan nilai karakter utama nasionalis dan religius dalam setiap

mata pelajaran dan mengembangkannya melalui kegiatan ko kurikuler dan ekstrakurikuler yang bervariasi dan menyenangkan secara terpadu. Upaya ini sekaligus untuk mengimplementasikan pendidikan karakter berbasis kelas dan budaya sekolah dengan **meningkatkan jalinan kerjasama tripusat pendidikan**, yakni sekolah orangtua dan masyarakat dalam menangkal paham radikalisme dan membangun karakter anak yang cinta akan tanah air, dan menjadi warga Negara Indonesia dengan ideologi terhadap ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Untuk mengintegrasikan upaya menangkal penyebaran paham radikal dengan PPK ini, terdapat beberapa langkah yang perlu dijalankan, yaitu sebagai berikut.

1. Penguatan GTK Dalam Membangun Karakter Siswa

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah lebih meningkatkan pendidikan berkelanjutan bagi para guru-guru Pendidikan Agama Islam PPKn dan guru relevan lainnya untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mempromosikan dan mentransformasikan pengetahuan dan perilaku toleran pada siswa. Perlu dilakukan inovasi pengembangan pembelajaran PAI dan PPKN yang lebih menarik tidak hanya didominasi dengan pendekatan ceramah-hafalan untuk pengetahuan, melainkan mencoba mengaplikasikan dalam konteks kejadian sehari-hari dan terkini-kontekstual dengan pendekatan yang kritis.
- b. Kurikulum PPKn secara intens dikembangkan dalam pembelajaran untuk menumbuhkan pengetahuan, keterampilan dan sikap siswa terhadap Pancasila, UUD 45, NKRI dan Binekatunggal Ika sebagai ideologi nasional hukum dasar dan kesatuan bangsa

dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- c. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti perlu lebih dikembangkan dengan memperhatikan nilai-nilai Islam rahmatan lilalamin yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam yang humanis, toleran, demokratis, dan multicultural sesuai tuntunan kurikulum.
- d. Menguatkan peran Kepala Sekolah dan guru dalam Menciptakan kegiatan guna Pembauran antar siswa yang bhineka; menseleksi Pembina Rois yang berasal dari luar atau alumni, mengkaji materi kegiatan Rois; dan guru agama perlu mendampingi siswa dalam kegiatan-kegiatan keagamaan guna menangkal paham yang berlawanan dengan Pancasila.

2. Perbukuan dan Sumber Belajar

Pusat perbukuan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) serta Kementerian Agama perlu memastikan kualitas buku ajar dan buku pengayaan PPKn dan PAI yang kondusif bagi promosi dan penguatan toleransi siswa di sekolah, dan mengembangkan modul pembelajaran penguatan nasionalisme, toleransi dan perdamaian sekaligus menangkal paham radikalisme. Guru PPKn dan PAI perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam menguasai IT dan disediakan fasilitas pembelajarann sehingga dapat mengimbangi dan mengontrol siswa menguasai materi dan teknologi pembelajaran berbasis IT dan dunia maya.

3. Penguatan Peran Masyarakat dan Orangtua

Orang tua dan Masyarakat perlu meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan sekolah dalam meningkatkan kemampuan akademik, sosial, emosional,

dan kesehatan fisik peserta didik; terlebih dalam mengembangkan cinta terhadap tanah air dan dalam menangkal penyebaran paham radikalisme. Misalnya Kerjasama dengan FKUB untuk kegiatan kebinekaan antar siswa lintas agama.

4. Literasi Digital dan Pendampingan Keluarga

Siswa perlu mendapat pelatihan literasi digital khususnya dalam menggunakan media online yang dilakukan oleh pihak sekolah yang bekerjasama dengan berbagai instansi terkait khususnya yang berkaitan dengan paham radikalisme. Selain itu, orang tua dan keluarga perlu dilibatkan dalam pendampingan dan pengawasan penggunaan media online yang dilakukan oleh pelajar. Terkait dengan hal tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (Ditbindikel) menyusun regulasi yang mengatur dan memfasilitasi literasi digital tersebut.

5. Regulasi dan Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Paham Radikal

Perlu regulasi/ pengaturan dari pihak-pihak terkait (Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri) dan/atau panduan yang dapat dijadikan dasar bagi para pihakterkait untuk mencegah masuk paham radikal di lingkungan sekolah. Untuk pelaksanaan regulasi tersebut perlu dibentuk pula **Satuan Tugas** pencegahanpenyebaran paham radikal di lingkungan pendidikan sampai di tingkat satuan pendidikan di wilayah kecamatan kecamatan. Tugas awal ialah mendeteksi secara dini adanya gejala masuknya paham dan tindakan radikalisme di sekolah, baik oleh siswa, guru maupun GTK serta melakukan pencegahan secara dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, SB, 2016. Deradikalisasi Dunia Maya Mencegah Symbiosis Terorisme dan Media. Jakarta: Penerbit Daulat Press Jakarta.
- Alwi, Hasan, et al. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Arif, Syaiful, 2010. Deradikalisasi Islam; Paradigma dan Strategi Islam Kultural, Depok: Koekoesan
- Arzita Tivany Wargadiredja, 2016. Lampu Kuning Meningkatkan Radikalisme di Sekolah-Sekolah Indonesia. https://www.vice.com/id_id/article/lampu-kuning-meningkatnya-radikalisme-di-sekolah-sekolah-indonesia. May 6 2017
- Busri.Endang, 2013. “Mengembangkan Sikap Toleransi dan Kebersamaan di Kalangan Siswa”. Jurnal Visi Ilmu Pendidikan (J-VIP), vol. 10, no. 1, edisi Januari 2013, Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Tanjungpura
- Bikhu Parekh, 2000. *Rethinking Multiculturalism; cultural diversity and political theory*, Cambridge; Harvard University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional. Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

- Idris Apandi, 2013. Kurikulum PPKN 2013 dalam <http://smp3saketi.blogspot.com/2014/11/karakteristik-tujuan-dan-ruang-lingkup.html>) dan <https://asminkarris.wordpress.com/2013/06/29/kurikulum-ppkn-2013/>
- George Mc. T. Kahin (lkpi th) lengkapi
- Imron, A. 2000. Budaya Kekerasan dalam Konflik Antaretnis dan Agama: Perspektif ReligijsKultural. Jurnal Akademika, No. 01/Th.XIX/2000. Surakarta: MUP
- Idris, Apandi. 2013. *Kurikulum* PPKN 2013. <https://asminkarris.wordpress.com/2013/06/29/kurikulum-ppkn-2013/>
- Isjwara, F., 2011. Pengantar Ilmu Politik, Bina Cipta, Bandung, Cetakan Keempatbelas
- Hakim, L. 2004. Terorisme di Indonesia. Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta
- Hans, Kohn. 1984. Nasionalisme Arti dan Sejarahhnya, Terj. Sumantri Mertodipuro. Jakarta: Erlangga
- Hasim, Moh.2015: Potensi Radikalisme Di Sekolah Studi Terhadap Buku Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar. Jurnal Edukai Volume 13, Nomor 2, Balai Litbang Agama SemarangAgustus 2015
- Kemendikbud, 2016.Silabus Mata Pelajaran Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/MA/SMK/MAK). Jakarta, Kemendikbud.
- Kemendikbud, 2016. Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekoah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/MA/SMK/MAK). Jakarta, Kemendikbud.

- Kemendikbud, 2016. *Kajian dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta, Kemendikbud.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- LaKIP, 2011. Hasil Survei LaKIP tentang kekerasan bermerek agama di kalangan pelajar. <http://sccollection.blogspot.co.id/2011/05/hasil-survei-lakip-tentang-kekerasan.html>.
- Maarif Institute, 2017. Ringkasan Eksekutif Penelitian Penguatan Institusi Sekolah Melalui Kebijakan Internal Sekolah yang Mengokohkan Kebinekaan: Kota Banda Aceh, Kabupaten Lebak, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Mataram, dan Kota Makassar.
- Mujani Saiful Research Consulting (SRMC) Desember 2015 dan 2007, lengkapi
- Notosusanto, Nugroho 1979. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II*. Jakarta: New Aqua Press
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP),
- Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
- Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (PJPN) 2005-2025. lengkapi
RPJPN)2005-2025.
- Puslitjak Dikbud. 2016/ *Kajian Pendidikan Kebhinekaan Pada Satuan Pendidikan Menengah*.
- Risalah Sidang BPUPKIPKI, 1995.

- Soekarno, 1965.. Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid II. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 21042/ MPK/ PR/2017 tanggal 11 April 2017 perihal implementasi PPK
- SETARA Institute, 2016. Laporan Survey Toleransi Siswa SMA Negeri Di Jakarta& Bandung Raya. Jakarta, Stara Institue.
- SETARA Institute, 2015. Laporan Survey Toleransi Siswa SMA Negeri Di Jakarta& Bandung Raya. Jakarta, Stara Institue.
- SIDP. 2015).
- SMRC, 2017. Kompas, 2007. Kewaspadaan Perlu Terus Ditingkatkan: Ada Populasi yang Ingin Pancasila Diganti. Jakarta, Kompas, 5 Juni 2017,hal 3. Responden yang memiliki hak pilih dalam pemilu/Pilkada.
- SMRC. Rakyat Indonesia Menolak ISIS: Rilis Survei SMRC.<http://www.saifulmujani.com/blog/2016/01/22/rakyat-indonesia-menolak-isis-rilis-survei-smrc>. 2016-01-22.
- Suryana, Toto. 2011. “Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antarumat Beragama” dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim, vol. 9, no. 2, hlm. 127
- Suprayitno, Totok, 2017. Aktualisasi Pancasila. Paparan Kolose Kanisius, 10 Mei 2017, Jakarta.
- Tribun Jatengnews: “Geger Pelajar di Sekolah-Sekolah Negeri di Cilacap di Cekoki Paham Radikalisme” (tribunjatengnews.com, 3 Agustus 2017)

Tony Blair Foundation. 2016. *Education and Security A Global Literature Review on The Role of Education in Countering Violent Religious Extremism*.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Unesco, 2016. *Preventing Violent Extremism*. Published in 2016 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France.

Wahid Foundation, 2016. RI Masih Rentan Intoleransi, Wahid Foundation Sampaikan Enam Rekomendasi. <http://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/RI-Masih-Rentan-Intoleransi-Wahid-Foundation-Sampaikan-Enam-Rekomendas>. August 2016.

Yumarlia, Deleny 2005, Peranan Guru PKn dalam Mengembangkan Sikap Nasionalisme Siswa. Skripsi Sarjana FPIPS UPI Bandung: tidak diterbitkan/

MENANGKAL RADIKALISME DALAM PENDIDIKAN

Ada kekhawatiran masuknya paham radikal di lingkungan sekolah, karena kondisi ini bertentangan dengan fungsi sekolah sebagai institusi pendidikan formal. Harus ada upaya terutama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menangkal masuknya paham radikal di kalangan pelajar.

Kajian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis: 1) Kondisi paham dan tindakan radikalisme di lingkungan sekolah, khususnya bagaimana tanggapannya terhadap dasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di kalangan pelajar; 2) Penyebab paham dan tindakan radikalisme terjadi di lingkungan sekolah guna menyusun bahan rekomendasi kebijakan tentang strategi untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme serta memperkuat karakter nilai nasionalis yang berdasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di kalangan pelajar.

Rekomendasi yang dihasilkan penelitian ini, yaitu: 1) Menjadikan Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai poros untuk menangkal penyebaran paham radikal di satuan pendidikan; 2) Penguatan GTK dalam membangun karakter siswa; 3) Pusat Perbukuan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) serta Kementerian Agama perlu memastikan kualitas buku ajar dan buku pengayaan PPKn dan PAI yang kondusif bagi promosi dan penguatan toleransi siswa di sekolah, dan mengembangkan modul pembelajaran penguatan nasionalisme, toleransi dan perdamaian sekaligus menangkal paham radikalisme; 4) Masyarakat dan orang tua siswa perlu lebih berperan dalam Penguatan Pendidikan Karakter siswa melalui pendidikan di lingkungan keluarga, memberikan keteladanan, contoh kepemimpinan dan pendampingan serta menangkal paham radikalisme, termasuk penggunaan medsos; 5) Perlu regulasi/aturan dari pihak-pihak terkait (Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri) dan/atau panduan yang dapat dijadikan dasar bagi para pihak terkait untuk mencegah masuk paham radikal di lingkungan sekolah.

